

**RENCANA STRATEGIS
POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA
2020 -2024
(Revisi Januari 2024)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Revisi Renstra Strategis (Renstra) Politeknik ATK Yogyakarta tahun 2020-2024. Rencana Strategis merupakan dokumen yang berisi tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan, serta pengukuran capaian kinerja. Rencana Strategis ini merupakan dokumen acuan penyelenggaraan kegiatan Politeknik ATK Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun.

Penyusunan Revisi Renstra ini mengacu kepada Revisi Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan berdasarkan amanah dan tupoksi yang diberikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) melalui Renstra BPSDMI yang telah disusun sebelumnya. Dasar hukum Revisi Rencana Strategis 2020-2024 adalah Surat Keputusan Direktur Politeknik ATK Yogyakarta Nomor: 50 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Politeknik ATK Yogyakarta Periode Tahun 2020-2024 (Tahun Anggaran 2024). Adapun rangkaian penyusunan Revisi Rencana Strategis ini melibatkan pihak terkait dari industri kulit, barang kulit, dan alas kaki selaku praktisi yang mengetahui perkembangan dan kebutuhan sumber daya manusia dan teknologi pada masa yang akan datang. Selain itu, mempertimbangkan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait. Serta, mengakomodir aspirasi sivitas akademika serta dinamika yang berkembang.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan dokumen Revisi Renstra Politeknik ATK Yogyakarta tahun 2022-2024. Rencana Strategis ini bersifat dinamis dan kami menyadari adanya banyak keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu kami mohon kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan Rencana Strategis ini.

Yogyakarta, 12 Januari 2024

Direktur



SUGIYANTO, S.Sn., M.Sn.

NIP. 196601011994031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.1.1. Pembangunan Industri Nasional	1
1.1.2. Pembangunan SDM Industri dan Pendidikan Vokasi	4
1.2. Kondisi Eksternal	6
1.2.1. Kinerja Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki Tahun 2016-2020.....	6
1.2.2. Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi	7
1.3. Kondisi Internal Organisasi	10
1.3.1. <i>Corporate University</i> BPSDMI.....	10
1.3.2. Bidang Pendidikan	11
1.3.3. Bidang Penelitian	12
1.3.4. Bidang Pengabdian Masyarakat, Inovasi, dan Kewirausahaan.....	14
1.3.5. Bidang Sumber Daya Manusia.....	14
1.3.6. Bidang Sarana dan Prasarana	16
1.3.7. Bidang Organisasi dan Manajemen	17
1.3.8. Situasi Pandemi Covid-19.....	19
BAB 2. VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	20
2.1. Visi.....	20
2.1.1. Visi Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri	21
2.1.2. Visi Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan BPSDMI	21
2.1.3. Visi Politeknik ATK Yogyakarta.....	21
2.2. Misi	21
2.2.1. Misi Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI)	21
2.2.2. Misi Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan BPSDMI.....	22
2.2.3. Misi Politeknik ATK Yogyakarta	22
2.3. Tujuan	23
2.4. Sasaran Strategis	24
2.4.1. Perspektif Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders Prespective</i>)	24
2.4.2. Perspektif Pelanggan (<i>Customer Perspective</i>)	25
2.4.3. Perspektif Proses Internal (<i>Internal Process Perspective</i>).....	25
2.4.4. Perspektif Pembelajaran Organisasi (<i>Learning and Growth Perspective</i>).....	25
BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	27
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	27
3.1.1. Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri <i>Dual System</i> Bertaraf Global Sebagai Referensi Model Pendidikan Vokasi Nasional	27
3.1.2. Pembangunan Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) sebagai HUB dan Ecosystem Center Industri 4.0.....	28
3.1.3. Pengembangan Kelembagaan Inkubator Bisnis Industri Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Industri.....	29
3.1.4. Pembangunan Digital ASN dan <i>Knowledge Management Center</i> Sebagai Pusat Pembinaan ASN Pembina Industri.....	29

3.1.5. Pembangunan wadah (<i>HUB Center</i>) sinergi, kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder nasional dan global dalam mengembangkan vokasi industri	30
3.2. Kerangka Regulasi	32
3.3. Kerangka Kelembagaan	33
BAB 4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	35
4.1. Target Kinerja	35
4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	36
4.3. Kerangka Pendanaan.....	37
BAB 5. PENUTUP	38
LAMPIRAN.....	39
Lampiran 1: Pohon Kinerja.....	40
Lampiran 2: Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Kerja	42
Lampiran 3: Matrik Keterkaitan antara Aktivitas/Kegiatan, KRO, RO, Indikator Kinerja, dan Sasaran Strategis	44
Lampiran 4: Pedoman Kinerja	49
Lampiran 5: Matriks Kerangka Regulasi.....	62
Daftar Pustaka.....	63

Daftar Gambar

Gambar 1 Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU Perindustrian	1
Gambar 2. Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam RIPIN	2
Gambar 3. Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional.....	3
Gambar 4. Kinerja Industri 2016-2020	6
Gambar 5. Performa Indonesia dalam Competitive Industrial	8
Gambar 6. PMI Industri pengolahan Non Migas 2015-2020	9
Gambar 7 Corpu BPSDMI Kementerian Perindustrian.....	10
Gambar 8 Skematik Standar Nasional Pendidikan Indonesia.....	12
Gambar 9 Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	15
Gambar 10 Sumber Daya Manusia Mahasiswa	16
Gambar 11 Sumber Daya Pembiayaan	17
Gambar 12 Sumber Daya Barang Milik Negara (BMN).....	17
Gambar 13. Badan Organisasi Politeknik ATK Yogyakarta	18
Gambar 14. Peta Strategis Politeknik ATK Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	24
Gambar 15. Struktur Kelembagaan BPSDMI.....	34

Daftar Tabel

Tabel 1. Struktur Demografi Penduduk Indonesia	5
Tabel 2. Target Indikator Tujuan 2020-2024.....	24
Tabel 3. Target Kinerja Politeknik ATK Yogyakarta 2020-2024	35
Tabel 4. Kerangka Pendanaan Politeknik ATK Yogyakarta 2020-2024.....	37

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Pembangunan Industri Nasional

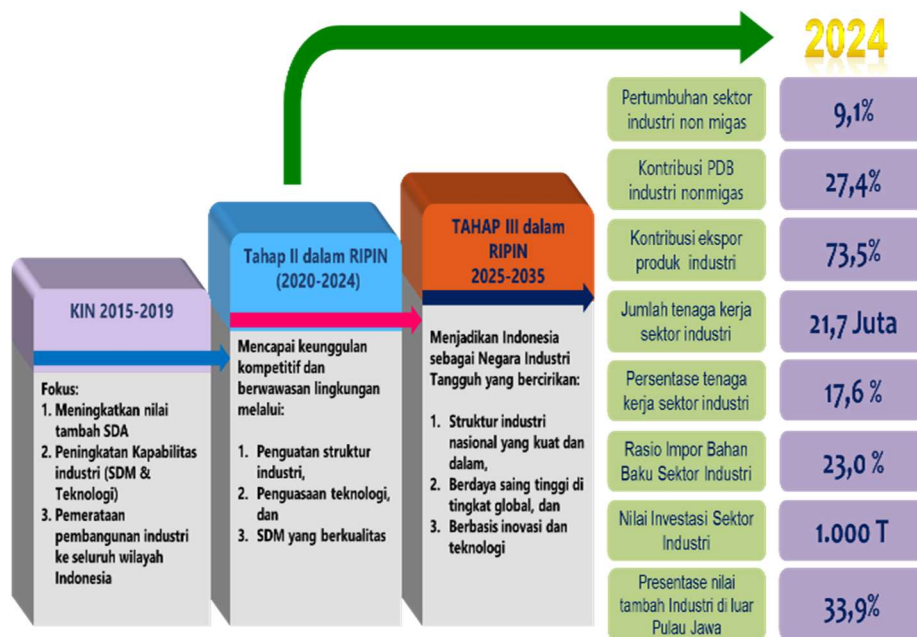
Sektor industri merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Sektor industri tidak saja memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, namun juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Peran penting sektor industri ini kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dimana industri diletakkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjalankan peran besar sebagai aktor utama pendorong kemajuan industri nasional secara sistematis dan terencana agar mampu tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain sesuai dengan visi Indonesia maju 2030. Visi Indonesia 2030 menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan kelima di dunia pada tahun 2030 bersama China, Amerika Serikat, India dan Uni Eropa.



Gambar 1 Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU Perindustrian

Sumber: UU No. 3 tahun 2014

Kementerian Perindustrian menuangkan arah dan kebijakan pembangunan industri nasional dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Sebagai peta jalan pembangunan industri jangka panjang, RIPIN 2015-2035 merupakan pedoman bersama bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri di Indonesia.

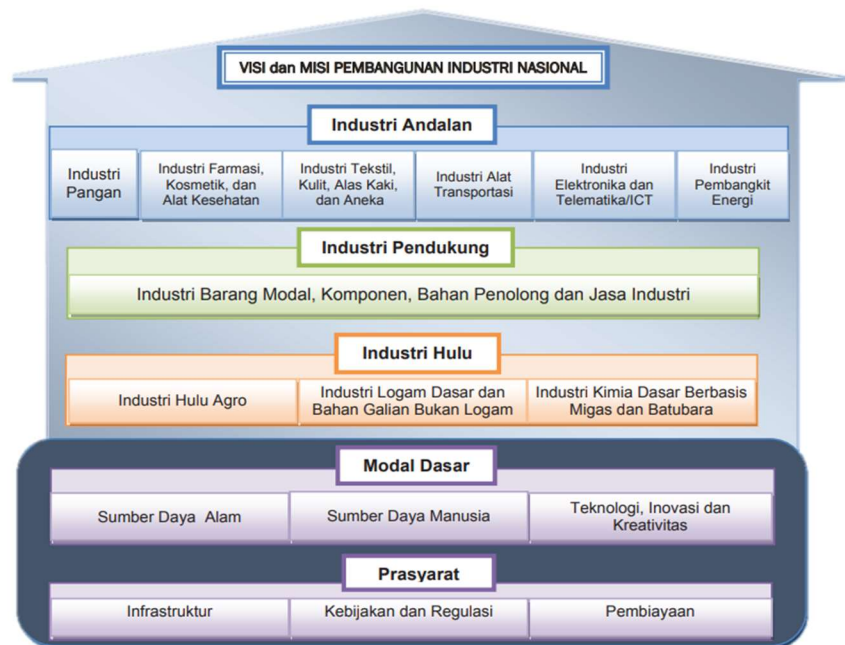


Gambar 2. Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam RIPIN
Sumber: PP No. 14 tahun 2015

RIPIN Tahun 2015-2035 telah menetapkan penahapan capaian pembangunan Industri kedalam tiga periode, yaitu tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Tahap II (2020 – 2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025 – 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Saat ini implementasi RIPIN telah memasuki tahap II, yang dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional (KIN) periode 2020-2024. Terdapat 10 kelompok industri prioritas yang akan dikembangkan di dalam KIN 2020-2024, yaitu (1) Industri Pangan, (2) Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan, (3) Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki

dan Aneka, (4) Industri Alat Transportasi, (5) Industri Elektronik dan Telematika, (6) Industri Pembangkit Energi, (7) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri, (8) Industri Hulu Agro, (9) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam, serta (10) Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.



Gambar 3. Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional
Sumber: PP No. 14 tahun 2015

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan sektor industri non-migas (2019), setidaknya dibutuhkan pertumbuhan sektor industri sebesar 6,2% setiap tahunnya agar dapat memberikan kontribusi sebesar 19,4% terhadap PDB dengan jumlah ekspor produk industri diharapkan mencapai 77,6% dari total ekspor Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sekitar 17,1 juta tenaga kerja sektor industri dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja industri sebesar 600 ribu pekerja setiap tahunnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pendidikan dan pelatihan yang dapat menjembatani antara siswa dengan industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri setiap tahunnya. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi merupakan sub sistem yang berfungsi mewujudkan SDM yang kompeten baik pada tatanan manajerial maupun operasional. Maka dari itu, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan selalu diarahkan pada terwujudnya SDM yang handal, efektif dan efisien baik untuk saat ini maupun masa mendatang.

Di sisi yang lain, seiring dengan perkembangan sektor perindustrian global, adopsi dan pengembangan teknologi Industri 4.0 kemudian muncul sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan industri nasional. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020– 2024 dimana penerapan industri 4.0 merupakan salah satu *major project* Pemerintah. Penerapan Industri 4.0 dinilai dapat

memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur agar lebih efisien dan menghasilkan produk berkualitas, yang juga diharapkan akan menarik investasi di bidang industri, karena industri di Indonesia akan lebih produktif dan berdaya saing tinggi dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja Indonesia dalam mengadopsi teknologi.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Politeknik ATK Yogyakarta telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Politeknik ATK Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024. RENSTRA Politeknik ATK Yogyakarta merupakan penjabaran dari RENSTRA Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) Tahun 2020 – 2024 yang juga merupakan penjabaran dari RENSTRA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Tahun 2020-2024 dan RENSTRA Kementerian Perindustrian Tahun 2020 - 2024 dan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024.

Politeknik ATK Yogyakarta sebagai satuan kerja dibawah PPPVI dan BPSDMI, mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang teknologi kulit, produk kulit dan alas kaki sebagai salah satu komponen strategis dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan dalam RENSTRA Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024, RENSTRA BPSDMI Tahun 2020 - 2024 dan RENSTRA PPPVI Tahun 2020 - 2024. Sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, RENSTRA Politeknik ATK Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 juga disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025; dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.

1.1.2. Pembangunan SDM Industri dan Pendidikan Vokasi

Menurut survei angkatan kerja nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, hingga tahun 2017 terdapat 128 juta angkatan kerja dari 192 juta penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 121 juta bekerja tetapi lebih dari 60% tenaga kerja Indonesia berpendidikan maksimum SMP dan yang berpendidikan SMA/SMK atau lebih rendah mencapai 87,9%. Yang masih menjadi masalah bagi pemerintah adalah jumlah pengangguran bersifat terbuka yang mencapai 7 juta jiwa dimana lebih kurang 37,6% berpendidikan maksimum SMP dan yang berpendidikan SMA/SMK atau lebih rendah mencapai kisaran 87,8%.

Melihat realitas yang terjadi dalam lingkup pembangunan SDM sampai hari ini, Indonesia sebenarnya belum siap untuk menyongsong Visi Indonesia 2030 dengan

persiapan – persiapan awalnya seperti Pasar Bebas ASEAN dan Bonus Demografi. Fakta yang terjadi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu menyerap dan menciptakan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja cenderung menurun. Asumsi 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 350 ribu sampai 400 ribu tenaga kerja tidak dapat tercapai. Asumsi tersebut hanya mampu menyerap 200 ribu tenaga kerja tiap tahunnya. HDI (Human Development Indeks) atau Indeks Pembangunan Manusia Indonesia saat ini hanya 0,629 peringkat 121 dari 186 negara di dunia.

Tabel 1. Struktur Demografi Penduduk Indonesia

Usia	Jumlah (%)	Pria (orang)	Wanita (orang)
0 – 14 Tahun	25,82	33.651.533	32.442.996
15 – 24 Tahun	17,07	22.238.735	21.454.563
25 – 54 Tahun	42,31	55.196.144	53.124.591
55 – 64 Tahun	8,18	9.608.548	11.328.421
>= 65 tahun	6,62	7.368.764	9.579.379

Sumber: BPS 2017, diolah Kemenperin

Oleh karena itu untuk mengawali pembangunan SDM Indonesia diperlukan suatu solusi yang baru dalam rangka pembangunan SDM Indonesia. Reformasi di bidang pendidikan menjadi lebih penting lagi yaitu dengan pendidikan yang murah, reformasi sistem pendidikan dengan *link and match*, job oriented dan pengajaran budi pekerti. Dan realokasi pengelolaan iklim tenaga kerja dan revitalisasi pendidikan dan latihan SDM dengan cara pembangunan infrastruktur baik fisik dan non fisik, regulasi tenaga kerja dan perbaikan bangunan hubungan industrial, serta menjadikan pembangunan SDM menjadi prioritas program pembangunan nasional. Bangunan SDM baru melalui solusi tersebutlah di harapkan mampu mengantar Indonesia menuju Visi Indonesia 2030 dengan SDM yang siap dan berdaya saing.

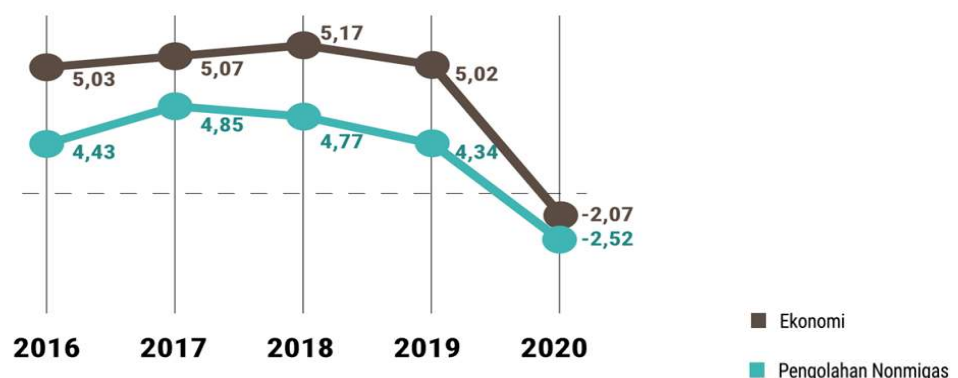
Di Indonesia, pendidikan vokasi sudah ada sejak lebih dari 150 tahun yang lalu, dan berkembang semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun perannya dalam membangun kualitas tenaga kerja relatif kecil dibandingkan dengan pendidikan umum (akademik). Pasokan tenaga kerja terdidik sebagian besar berupa lulusan pendidikan akademik atau pendidikan umum. Pada tenaga kerja berpendidikan sekolah menengah atas, lulusan SMK hanya 35%. Di antara tenaga kerja berpendidikan tinggi, lulusan program diploma dan politeknik hanya sebesar 25%. Komposisi pasokan tenaga kerja tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih berminat mengikuti pendidikan akademik dari pada pendidikan vokasi. Untuk itu, maka Pendidikan Vokasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, baik Politeknik / Akademi Komunitas maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu meningkatkan kualitasnya sehingga dapat

bersaing dengan pendidikan lain di dunia melalui beberapa tahapan pencapaian. Ke depan pendidikan vokasi di bawah Kemenperin dapat terdaftar pada lembaga pemeringkat Pendidikan global sehingga lebih dikenal oleh customer dan stakeholder di berbagai belahan dunia, dan lulusannya dapat diakui secara global.

1.2. Kondisi Eksternal

1.2.1. Kinerja Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki Tahun 2016-2020

Secara umum sektor industri pengolahan tumbuh lebih rendah dari perekonomian Indonesia sejak tahun 2016. Di tahun 2019, sektor industri pengolahan non-migas tumbuh 4,34 persen, sedangkan PDB Indonesia tumbuh 5,02 persen. Kondisi ini mengakibatkan *share* PDB industri pengolahan turun menjadi di bawah 20 persen yang sudah terjadi selama 2 tahun terakhir. Di tahun menjadi 2019, *share* PDB industri pengolahan adalah sebesar 19,7 persen. Pertumbuhan Industri pengolahan non-migas juga mengalami perlambatan selama 3 tahun terakhir. Tahun 2017 industri pengolahan non migas tumbuh 4,85%, namun turun menjadi 4,77% pada tahun 2018 dan 4,34% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, PDB Indonesia dan industri pengolahan non migas tumbuh negatif masing-masing -2,07% dan -2,52% disebabkan pandemi COVID-19.



Gambar 4. Kinerja Industri 2016-2020

Sumber: BPS 2021, diolah Kemenperin

Kondisi perekonomian global sepanjang tahun 2019 terpengaruh oleh gejolak ekonomi dan geopolitik, antara lain perang dagang antara AS-RRC serta Jepang-Korea Selatan, konflik Timur Tengah, *deadlock* negosiasi permasalahan Brexit, dan lain-lain. Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2019 masih tertahan di bawah 3% dan perdagangan global hanya tumbuh di kisaran 4% (Arfandi, 2019). Melemahnya volume perdagangan global mempengaruhi performa manufaktur global yang ditunjukkan oleh *Purchasing Manager Index* (PMI) global tahun 2019 sebesar 50,3%. Proyeksi pertumbuhan perdagangan global awalnya diprediksi akan membaik di tahun 2020, akan tetapi pada tahun 2020 terjadi pandemi akibat COVID-19, sehingga industri justru tumbuh negatif -2,52% pada tahun 2020. Di sisi yang lain, jumlah tenaga kerja industri dalam lima tahun terakhir sampai Agustus 2019 mengalami kenaikan dengan penyerapan tenaga kerja di sektor industri sebesar 19,2 juta orang pada Agustus 2019. Akan tetapi

penyerapan tenaga kerja industri menurun pada Agustus 2020 sebesar 17,48 juta orang yang disebabkan pandemi COVID-19.

Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan kinerja industri kulit, barang kulit, dan alas kaki karena merupakan kelompok industri pengolahan yang dikategorikan sebagai sektor prioritas dalam pengembangannya. Kelompok industri ini juga berperan strategis sebagai penghasil devisa negara.¹ Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa industri penyamakan kulit pada akhir 2020 akan tumbuh maksimal 1 persen dari realisasi 2019. Adapun, laju pertumbuhan lapangan usaha industri kulit per 2019 terkoreksi 0,99 persen.² Pada tahun 2019 industri alas kaki disebut sebagai salah satu industri yang bersinar. Namun, industri penyamakan kulit sebagai industri penopang bagi industri alas kaki justru dalam keadaan yang menurun akibat keadaan bahan baku yang sulit didapatkan dan rendahnya daya saing. Dalam 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun terakhir, industri penyamakan kulit berada dalam tren penurunan. Salah satunya disebabkan oleh daya saing produk yang relatif rendah dibandingkan dengan produk impor. Sebagian besar industri sepatu menggunakan produk kulit impor dengan pertimbangan kulit impor memiliki harga yang lebih murah walaupun produk lokal memiliki kualitas yang lebih baik.

1.2.2. Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi

Pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian dunia, termasuk Indonesia. COVID-19 mulai menyebar di Indonesia sejak awal Maret 2020. Kebijakan Pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 melalui penerapan kebijakan pembatasan mobilitas, termasuk penerapan protokol kesehatan dan PSBB di beberapa daerah tidak dapat dihindari telah menurunkan secara tajam aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 2,97% (yoy) pada triwulan I 2020 dan berkontraksi 5,32% (yoy) pada triwulan II 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 3,49% pada kuartal ketiga 2020, sedangkan sektor industri mengalami kontraksi 4,02%. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, bahkan di antara negara G-20, dimana Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Tiongkok dan Korea Selatan.

UNIDO merilis *Industrial Development Report 2020* dimana Indonesia menempati urutan ke-38 dari total 150 negara dalam peringkat *Competitive Industrial Performance* (CIP) Index tahun 2019. Capaian tersebut naik satu peringkat dibanding tahun 2018 yang berada di posisi ke-39.

¹ <https://www.kemenperin.go.id/artikel/16408/Kemenperin-Pacu-Kinerja-Industri-Kulit,-Alas-Kaki-dan-Aneka>

² Kinerja Industri Penyamakan Kulit Diprediksi Masih Positif, diakses

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200923/257/1295742/kinerja-industri-penyamakan-kulit-diprediksi-masih-positif> pada 7 April 2022



Gambar 5. Performa Indonesia dalam Competitive Industrial Performance Index 2020

Sumber: Competitive Industrial Performance Index 2020

PMI pada Desember 2020 adalah sebesar 51,3 dan pada Januari 2021 meningkat menjadi 52,2. Perbaikan terjadi pada hampir seluruh komponen pembentuk PMI, terutama volume produksi ditopang oleh penerimaan barang input yang lebih cepat, serta jumlah tenaga kerja. Secara sektoral, mayoritas subsektor mencatat perbaikan kinerja pada triwulan IV 2020, terutama subsektor Logam Dasar Besi dan Baja, serta subsektor Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet dan subsektor Kertas dan Barang Cetak yang sudah berada pada fase ekspansi. Analisis *Vibiz Research Center* melihat kenaikan yang berlanjut dari kinerja sektor Industri Pengolahan triwulan IV 2020 ini sebagai keberhasilan bersama antara pemerintah dan segenap masyarakat dalam mendukung fase *new normal* atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di tengah panjangnya pandemi COVID-19 ini. Kenaikan yang melanjutkan format *V Curve* sebelumnya mengindikasikan akan terjadinya pemulihan yang cepat pada manufaktur di Indonesia.



Gambar 6. PMI Industri pengolahan Non Migas 2015-2020
 Sumber: Trading Economics

Peningkatan PMI didorong oleh komponen volume total pesanan, volume persediaan barang jadi, dan volume produksi yang berada pada fase ekspansi. Pada periode tersebut beberapa subsektor diperkirakan akan berada pada fase ekspansi, yaitu subsektor Makanan, Minuman dan Tembakau, subsektor Semen dan Barang Galian Non Logam, subsektor Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet, dan subsektor Kertas dan Barang Cetak.

Pada tahun 2020, kinerja ekspor industri pengolahan masih mampu bertumbuh positif sebesar 2,91 persen meskipun di tengah pandemi. Pertumbuhan yang masih positif ini tidak terlepas dari kinerja ekspor 5 subsektor yang masih mampu bertumbuh positif, yakni industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki (5,74 persen).³ Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki berhasil tumbuh lebih tinggi pada 2021 setelah sempat terpuruk di tahun sebelumnya akibat pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produk domestik bruto (PDB) industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp42,51 triliun pada 2021. Nilai tersebut persinya sebesar 1,44% dari industri pengolahan nonmigas nasional. Jika diukur menurut PDB atas dasar harga konstan (ADHK) industri ini tumbuh 7,75% menjadi Rp28,17 triliun pada 2021, dibanding tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sedalam 8,76%. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) ke industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki tercatat tumbuh 77,41% secara tahunan menjadi US\$700,4 juta pada 2021. Penanaman modal asing (PMA) ke industri tersebut juga melonjak 126,87% menjadi US\$485,5 juta. Demikian pula nilai ekspor industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki

³ Nadya dan Robby Alexander Sirait, Ringkasan Eksekutif “Kinerja Industri Pengolahan dan Catatan Kritis Strategi Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan 2022”, diakses dari <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-68.pdf> pada 7 April 2022, hlm. 8

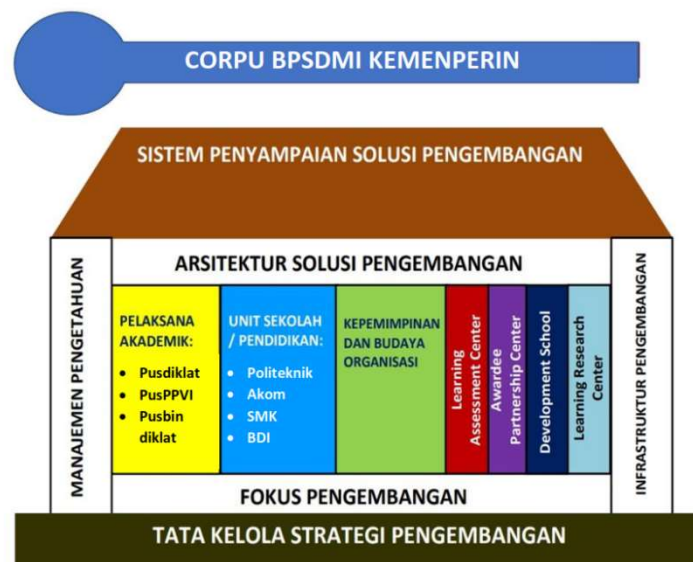
tumbuh 30,97% menjadi US\$7,1 miliar pada 2021, dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah US\$5,42 miliar.⁴

1.3. Kondisi Internal Organisasi

1.3.1. *Corporate University* BPSDMI

Corporate University (CorpU) dapat dikatakan sebagai salah satu mesin strategis suatu organisasi yang mengintegrasikan apa yang telah tersedia, yaitu sumber daya, proses bisnis, dan orang-orang terlibat dalam proses pembelajaran untuk mencapai performansi terbaik dan secara terus menerus meningkatkan kompetensi (*Knowledge, Skill dan Attitude*) dari orang-orang yang berada dalam ekosistem organisasi dengan didukung oleh pengelolaan pengetahuan (*Knowledge Management*).

Jika membangun suatu konstruksi gedung, hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dengan serius adalah konstruksi pondasinya. Dalam konsep *CorpU* sebagai sebuah bangunan rumah, maka pondasinya adalah kepastian dan strategi tata kelola (*strategy governance*) sehingga dapat dilakukan strategi implementasi.



Gambar 7 CorpU BPSDMI Kementerian Perindustrian

Konstruksi bangunan House of *CorpU* BPSDMI Kementerian Perindustrian dapat dipahami sebagai berikut:

- tata Kelola Strategi Pengembangan, merupakan bentuk organisasi pelaksana *corporate university*, sekaligus manajemen dan tata kelola koordinasi guna menghindari irisan maupun benturan kewenangan antar pelaksana pengembangan;
- fokus pengembangan, merupakan domain atau ruang lingkup dan jenjang pengembangan yang dilakukan dalam posisi unit pelaksana *corporate university*;
- manajemen pengetahuan, merupakan proses identifikasi, *capturing*, penyimpanan, distribusi, dan pemanfaatan pengetahuan;

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/30/mulai-pulih-industri-kulit-dan-alas-kaki-tumbuh-775-pada-2021>

- d. Infrastruktur pengembangan, merupakan sarana pembelajaran fisik dan non-fisik berupa layanan, baik berupa smart classroom dan penguatan Learning Management System (LMS);
- e. Arsitektur solusi pengembangan, merupakan desain pembelajaran, peta kebutuhan, dan strategi implementasi pembelajaran, yang dikuatkan adanya unit assessment center, pengelola beasiswa pendidikan, sekolah pengembangan kader kepemimpinan, dan unit penelitian pembelajaran;
- f. Sistem penyampaian dan pengembangan, merupakan model atau format penyelenggaraan pembelajaran secara terintegrasi antara input, proses, dan output pembelajaran dengan kinerja dan talenta.
- g. Pelaksana akademik dan pendidikan, merupakan unit operasional teknis dan taktis dalam pengembangan Pendidikan terapan atau vokasional bidang industri.

1.3.2. Bidang Pendidikan

Dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, Politeknik ATK selalu mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga diharapkan pendidikan di Politeknik ATK Yogyakarta dapat;

1. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
2. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Aturan-aturan dan dasar hukum yang dijadikan dasar pelaksanaan pendidikan di Politeknik ATK Yogyakarta adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik ATK Yogyakarta
6. Surat Keputusan Direktur Politeknik ATK Yogyakarta No 23 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Penggunaan Rencana Strategis (Renstra) Politeknik ATK Yogyakarta periode tahun 2020-2024 Tahun Anggaran 2020.
7. Surat Keputusan Direktur Politeknik ATK Yogyakarta Nomor: 50 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Politeknik ATK Yogyakarta Periode Tahun 2020-2024 (Tahun Anggaran 2024).
8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 06/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATK.



Gambar 8 Skematik Standar Nasional Pendidikan Indonesia

1.3.3. Bidang Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi

Ukuran kinerja dosen yang baik ditentukan oleh pencapaian setiap komponen dalam indikator akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian merupakan salah satu tugas utama tenaga akademik di perguruan tinggi. Budaya dan keterampilan meneliti perlu ditumbuhkembangkan di kalangan tenaga akademik perguruan tinggi sejak awal karir seorang dosen. Berbagai skim pendanaan penelitian telah disediakan baik dari level perguruan tinggi hingga level kementerian (nasional). Pada umumnya skim pendanaan penelitian harus diraih melalui kompetisi yang sangat ketat. Biasanya hanya dosen dengan pengalaman dan keterampilan meneliti yang baik yang akan berhasil meraih dana penelitian. Politeknik ATK memfasilitasi

kegiatan penelitian melalui dua mekanisme yaitu Program Penelitian pembinaan dan Program Bantuan Publikasi.

Program Penelitian Pembinaan

Untuk memberikan kesempatan bagi dosen muda dalam melakukan penelitian dan berlatih meraih dana penelitian melalui kompetisi akademik yang sehat, Politeknik ATK mengembangkan skim Program Penelitian Pembinaan. Melalui program ini dosen pemula dengan jabatan fungsional asisten ahli/lektor diharapkan akan memiliki kualitas penelitian yang baik karena akan dilaksanakan melalui pembinaan dari tenaga ahli ditunjuk yang memiliki kapasitas

Tujuan Program Penelitian Pembinaan ini adalah :

1. Memberikan kesempatan bagi dosen muda (lektor/asisten ahli) Politeknik ATK untuk melakukan penelitian melalui kompetisi terbatas di kalangan dosen muda.
2. Meningkatkan iklim pembinaan akademik kepada dosen dengan berbasis pada aktivitas penelitian.

Program Bantuan Publikasi

Jenis Publikasi Jenis publikasi/artikel ilmiah yang dapat didanai pada program bantuan/*reward* publikasi Politeknik ATK Yogyakarta, antara lain dalam bentuk:

1. Seminar Nasional,
2. Seminar Internasional,
3. Jurnal Nasional,
4. Jurnal Internasional.

Dalam melakukan bantuan publikasi maka Politeknik ATK Yogyakarta berpedoman pada aturan;

1. Pedoman Publikasi Ilmiah 2017. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2017.
2. Panduan Pengajuan Insentif Artikel Terbit Pada Jurnal Internasional Bereputasi Tahun 2018. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2018.

1.3.4. Bidang Pengabdian Masyarakat, Inovasi, dan Kewirausahaan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bagi Politeknik ATK Yogyakarta. Kemanfaatan dari terselenggaranya proses pendidikan diharapkan dapat dirasakan mulai dari segala kalangan, baik akademisi, industri, maupun stakeholder lain. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

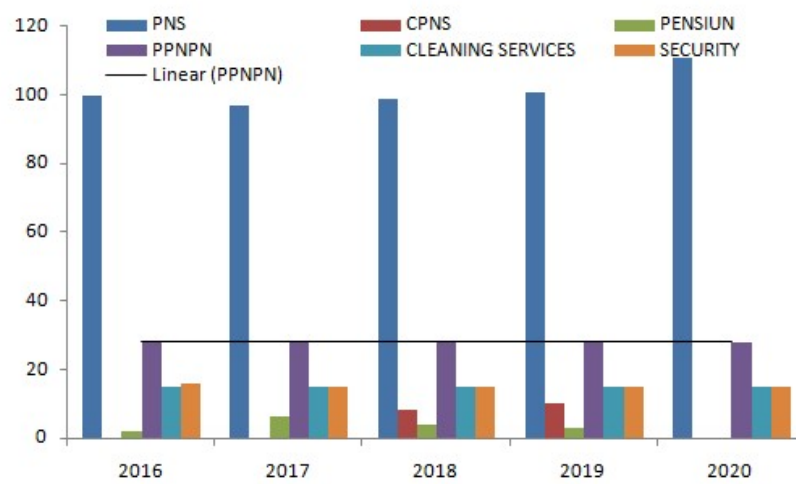
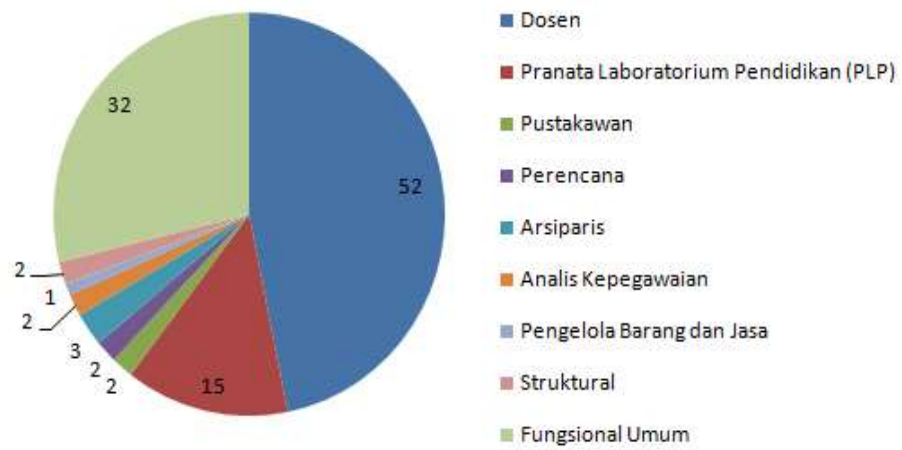
Program pengabdian pada masyarakat dirancang oleh Politeknik ATK Yogyakarta untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Adapun tujuan Pengabdian pada masyarakat adalah :

1. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian;
2. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Melakukan kegiatan yang mampu meringankan masyarakat terbelah (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang terbelah secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya;
4. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.

1.3.5. Bidang Sumber Daya Manusia

Terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC), Indonesia dan sembilan anggota ASEAN lainnya memasuki persaingan yang sangat ketat di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Adanya MEA, akan menuntut lulusan dengan kualifikasi standar ASEAN, serta harus bersertifikat standar ASEAN.

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peranan penting dalam keberhasilan pembangunan suatu bangsa, banyak negara di dunia telah menunjukkan bahwa dengan SDM yang handal dapat menjadi sebuah negara yang disegani. Kualitas pendidikan vokasi yang baik tidak terlepas dari ketersediaan SDM (dosen, tenaga kependidikan dan karyawan) dan fasilitas kampus yang dimiliki seperti infrastruktur, peralatan, buku-buku, dan sebagainya. Dalam hal ini pengukuran kualitas SDM dan fasilitas, pendidikan di Indonesia memiliki panduan yaitu Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.



Gambar 9 Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan

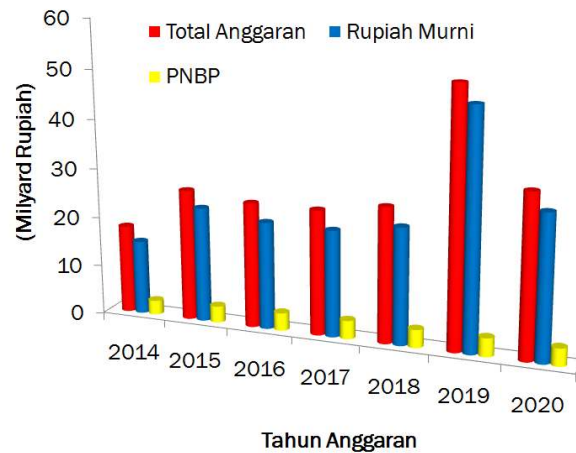


Gambar 10 Sumber Daya Manusia Mahasiswa

1.3.6. Bidang Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana atau fasilitas pendidikan merupakan salah satu komponen yang menunjang keberhasilan atau ketercapaian tujuan pendidikan. Segala bentuk permasalahan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana hendaknya segera dapat dicarikan solusi. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana belajar atau perkuliahan yang efisien dan berjalan lancar. Proses pembelajaran dapat dikatakan baik atau buruk tergantung pada kinerja fungsi dari sarana dan prasarana yang tersedia. Politeknik ATK Yogyakarta secara rutin membuat perencanaan dan evaluasi yang matang dan komprehensif terhadap pemenuhan kebutuhan SDM dan fasilitas. Hal ini dilakukan

untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai perguruan tinggi vokasi dibawah Kementerian Perindustrian RI.



Gambar 11 Sumber Daya Pembiayaan

NO	URAIAN	JUMLAH			
		2016	2017	2018	2019
1	Barang Konsumsi	138.000	1.459.500	20.811.600	17.172.000
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	1.960.000
3	Suku Cadang	0	0	0	0
4	Bahan Baku	0	0	68.500	17.550.750
5	Persediaan Lainnya	0	0	0	29.600
6	Tanah	14.626.072.000	59.051.455.000	59.051.455.000	95.349.027.000
7	Peralatan dan Mesin	21.639.756.209	17.451.056.103	17.318.494.500	22.467.627.902
8	Gedung dan Bangunan	36.427.115.490	29.060.405.258	28.138.276.938	34.111.706.182
9	Irigasi	25.706.500	25.117.500	24.526.500	0
10	Jaringan	578.173.945	549.484.331	520.794.717	492.105.102
11	Aset Tetap Lainnya	595.279.616	563.689.191	563.689.191	563.689.191
12	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0	0
13	Aset Tak Berwujud Lainnya	181.509.280	181.509.280	211.509.280	211.509.280
14	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
15	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	0	0	0	0
JUMLAH		74.073.753.200	106.904.376.163	105.869.826.226	153.252.777.007

Gambar 12 Sumber Daya Barang Milik Negara (BMN)

1.3.7. Bidang Organisasi dan Manajemen

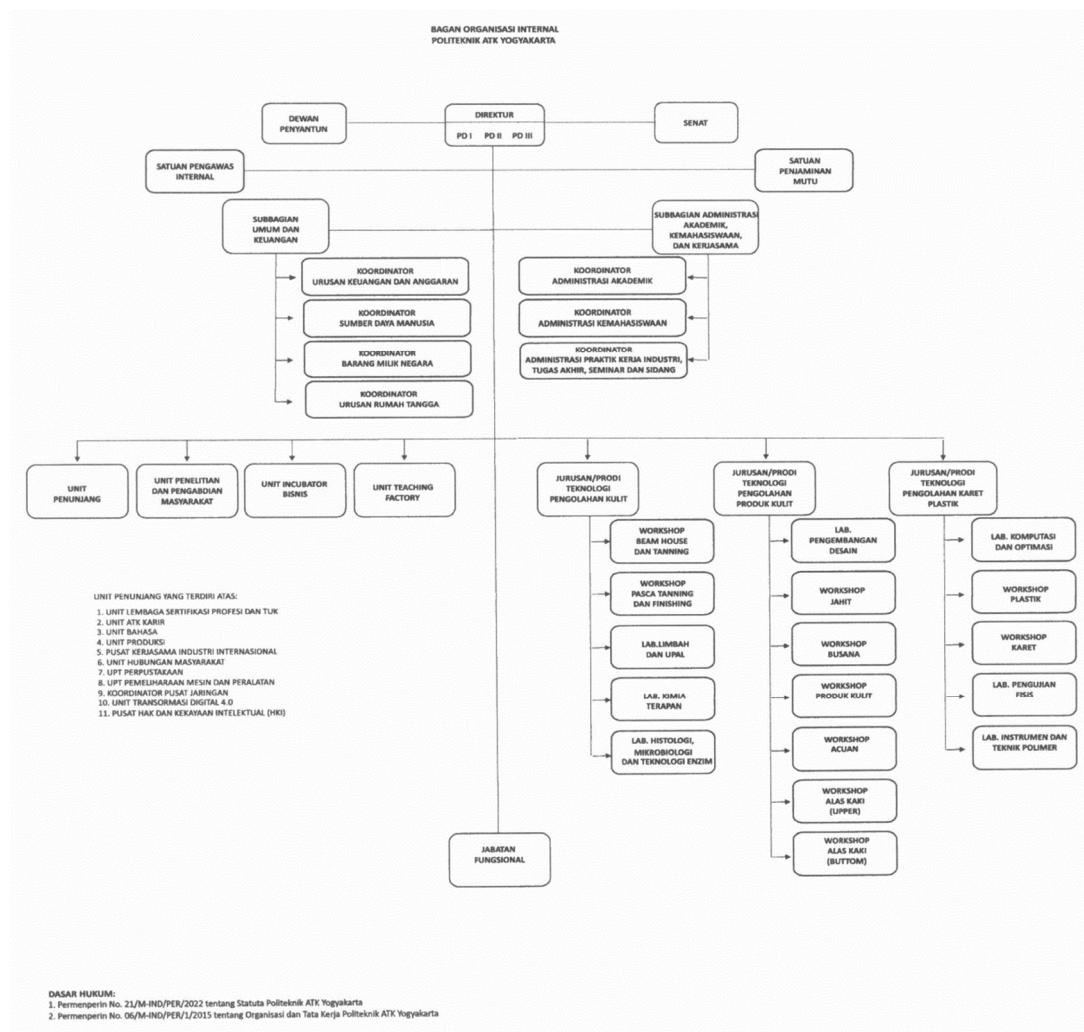
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 06/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATK Yogyakarta; diantaranya adalah sebagai berikut:

Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Politeknik ATK Yogyakarta. Direktur mempunyai tugas memimpin Politeknik ATK Yogyakarta. Dalam melaksanakan tugas Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Direktur.

- Pembantu Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I

- b. Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II
- c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur penjaminan mutu yang melaksanakan fungsi dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan pendidikan, sistem penjaminan mutu. Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan non akademik. Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama Sama mempunyai tugas melakukan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, hubungan alumni, perencanaan, sistem informasi, dan kerja sama di lingkungan Politeknik ATK Yogyakarta. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Politeknik ATK Yogyakarta.



Gambar 13. Badan Organisasi Politeknik ATK Yogyakarta

1.3.8. Situasi Pandemi Covid-19

Pada akhir tahun 2019 dunia mulai menghadapi Pandemi Covid-19, dan pada awal tahun 2020 Indonesia juga mulai terdampak, sehingga berdampak pula pada seluruh kegiatan di Politeknik ATK Yogyakarta. Hal ini harus diantisipasi oleh Politeknik ATK Yogyakarta untuk menyesuaikan Rencana Strategisnya agar semua kegiatan dapat tetap terlaksana. Pelaksanaan beberapa kegiatan seperti Kegiatan Belajar Mengajar dan kegiatan yang melibatkan pihak luar lebih banyak dilaksanakan secara **Online** (*dalam jaringan = daring*) melalui aplikasi **Video Conference** atau aplikasi komunikasi dua arah lainnya.

Untuk menghadapi Pandemi Covid-19 ini, BPSDMI menerapkan beberapa kebijakan, yang salah satunya melakukan penghematan dan realokasi anggaran pada anggaran Satuan Kerja di bawah BPSDMI termasuk Politeknik ATK Yogyakarta. Penghematan dan realokasi anggaran ini dimaksudkan untuk memfokuskan pada kegiatan untuk mengatasi dan mencegah penyebaran Covid-19. Kegiatan yang akan dilakukan antara lain adalah pengadaan Masker, Faceshild, Hand Sanitizer, Disinfektan, jasa tes Covid-19 dan lain-lain. Sedangkan untuk memudahkan komunikasi karena keterbatasan tatap muka langsung, satuan kerja Pendidikan juga akan mengadakan langganan aplikasi *Video Conference* dan mengadakan bantuan pulsa (paket data) untuk para dosen, pegawai dan mahasiswa. Aplikasi *Video Conference* tersebut akan sangat membantu dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar pada satuan kerja Pendidikan dibawah BPSDMI. Hampir seluruh kegiatan belajar mengajar akan dilakukan secara *online* (*daring*) sehingga mahasiswa dapat berkomunikasi dua arah dengan pengajarnya. Dampak Pandemi Covid-19 ini juga menyebabkan Politeknik ATK Yogyakarta harus menggeser beberapa target rencana kegiatan ke tahun berikutnya untuk mengantisipasi kekhawatiran kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana pada masa Pandemi Covid-19 ini.

BAB 2.

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi adalah suatu rangkaian kata yang membuat impian, cita-cita, nilai, masa depan suatu organisasi. Visi juga merupakan sebuah tujuan dari sebuah institusi yang tercipta dari hasil pemikiran para pendiri terkait gambaran masa depan institusi. Dengan adanya visi memberikan fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menjadi inspirasi dan motivasi bagi para anggota institusi agar memberikan kontribusi yang maksimal. Visi sebagai gambaran masa depan tersebut sangat perlu penjelasan terkait bagaimana langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan misi untuk menggambarkan rencana atau cara yang ditentukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan. Misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Sedangkan tujuan adalah penjabaran visi dan misi, serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu lembaga atau institusi.

Berikut adalah visi, misi, dan tujuan Politeknik ATK Yogyakarta yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan Kementerian Perindustrian dan BPSDMI. Visi, misi, dan tujuan Politeknik ATK Yogyakarta tercantum pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik ATK Yogyakarta pada Pasal 9, 10, dan 11.

2.1. Visi

Salah satu prioritas pemerintah yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berkaitan dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas serta berdaya saing. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian yang dipimpin oleh seorang menteri yang bertugas membantu Presiden di bidang perindustrian, juga memiliki visi Kementerian Perindustrian yang ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024.

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Cita-cita yang tertuang dalam kalimat visi tersebut apabila dilihat dari sudut pandang sektor industri dapat diterjemahkan menjadi upaya mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi yang dimaksud yakni dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan juga mengelola Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang inovatif

melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

2.1.1. Visi Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri

Visi PPPVI disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan visi dan misi BPSDMI serta memberikan gambaran umum kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra di tahun 2024. Selain itu, penyusunan visi dan misi PPPVI juga mempertimbangkan capaian kinerja, kondisi internal dan eksternal (potensi dan permasalahan), arah organisasi ke depan, serta aspirasi dari *stakeholders* terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Visi PPPVI ditetapkan sebagai berikut:

“Menjadi Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Bertaraf Global untuk Mendukung Pembangunan Industri Nasional yang Berdaya Saing”

2.1.2. Visi Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan BPSDMI

Untuk mewujudkan visi *Corporate University* BPSDMI Kementerian Perindustrian menjadikan Vokasi Industri Bertaraf Global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri Tangguh, maka pengembangan kelembagaan Politeknik dan Akademi Komunitas di lingkungan BPSDMI ditetapkan visi dan misi yang diberlakukan sama di seluruh politeknik dan Akademi Komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagai berikut.

Visi: *“Menjadi penyelenggara pendidikan vokasi industri yang excellence dan berdaya saing global.”*

2.1.3. Visi Politeknik ATK Yogyakarta

Mengacu pada visi BPSDMI di atas maka visi Politeknik ATK Yogyakarta yang tercantum pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik ATK Yogyakarta Pasal 9 adalah sebagai berikut:

“Visi sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi Industri yang unggul (excellence) dan berdaya saing global di bidang industri kulit, produk kulit/alas kaki, karet, dan plastik pada tahun 2030”

2.2. Misi

2.2.1. Misi Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI)

Untuk mewujudkan visi PPPVI di atas, dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan PPPVI sebagai berikut:

1. Mengembangkan Pendidikan Vokasi Industri *Dual System* bertaraf global sebagai referensi model pendidikan vokasi nasional;
2. Mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri pada lembaga pendidikan dan pelatihan industri;

3. Membangun wadah (*HUB Center*) sinergi, kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder nasional dan global dalam mengembangkan vokasi industri.

2.2.2. Misi Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan BPSDMI

Seperti halnya pada visi, dalam rangka mewujudkan visi *Coporate University* BPSDMI juga memberikan misi yang berlaku sama bagi seluruh Politeknik dan Akademi Komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian, yakni:

- a. Menyelenggarakan pendidikan *dual system* dengan *STEM learning model* berstandar global;
- b. Melaksanakan Penelitian Terapan *problem solving* sektor industri prioritas;
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pengembangan industri;
- d. Mengembangkan kompetensi industri 4.0 melalui pembangunan satelit PIDI 4.0;
- e. Membangun dan mengembangkan kelembagaan Inkubator bisnis industri yang terintegrasi dengan *stakeholder* terkait;
- f. Mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi LSP; dan
- g. Mengembangkan kelas industri.

2.2.3. Misi Politeknik ATK Yogyakarta

Mengacu pada misi PPPVI di atas, misi Politeknik ATK Yogyakarta yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik ATK Yogyakarta Pasal 10 adalah:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi industri sistem ganda dengan pembelajaran Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) berstandar global;
- b. Melaksanakan penelitian terapan untuk pemecahan permasalahan di sektor industri prioritas;
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ekosistem Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM);
- d. Mengembangkan kompetensi transformasi digital industri 4.0 melalui pembangunan Digital Capability Centre (DCC) sebagai satelit Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0);
- e. Membangun dan mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait;
- f. Mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi; dan
- g. Mengembangkan kelas industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri (*taylor made*).

2.3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri seperti disebutkan di atas, BPSDMI menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu *“Meningkatkan Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Bertaraf Global untuk Mendukung Pembangunan Industri Nasional yang Berdaya Saing dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Industri Tangguh”*.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Politeknik ATK Yogyakarta, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik ATK Yogyakarta Pasal 10 tujuan Politeknik ATK Yogyakarta dibawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian RI adalah sebagai berikut :

- a. menghasilkan lulusan diploma tiga yang kompeten sesuai kebutuhan industri dengan menerapkan pembelajaran Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) berstandar global dan Pendidikan sistem ganda;
- b. menghasilkan penelitian terapan untuk pemecahan permasalahan di sektor industri kulit, produk kulit/alas kaki, karet, dan plastik;
- c. menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ekosistem Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM);
- d. terwujudnya layanan transformasi digital industri 4.0 melalui pembangunan Digital Capability Centre (DCC) sebagai satelit Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0);
- e. menghasilkan wirausaha industri melalui inkubator bisnis industri yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait;
- f. meningkatnya skema kompetensi dan uji kompetensi di Politeknik ATK Yogyakarta; dan
- g. terwujudnya kelas industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri (tailor made).

Selain tujuan institusi, Politeknik ATK Yogyakarta juga mempunyai tujuan kinerja sesuai tujuan kinerja BPSDMI. Adapun tujuan kinerja Politeknik ATK Yogyakarta yang akan dicapai hingga tahun 2024 sesuai tujuan BPSDMI adalah “Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional”, tujuan ATK adalah “Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional” Berikut indikator kinerja tujuan Politeknik ATK Yogyakarta”Tersedianya SDM Industri yang kompeten” sampai dengan tahun 2024:

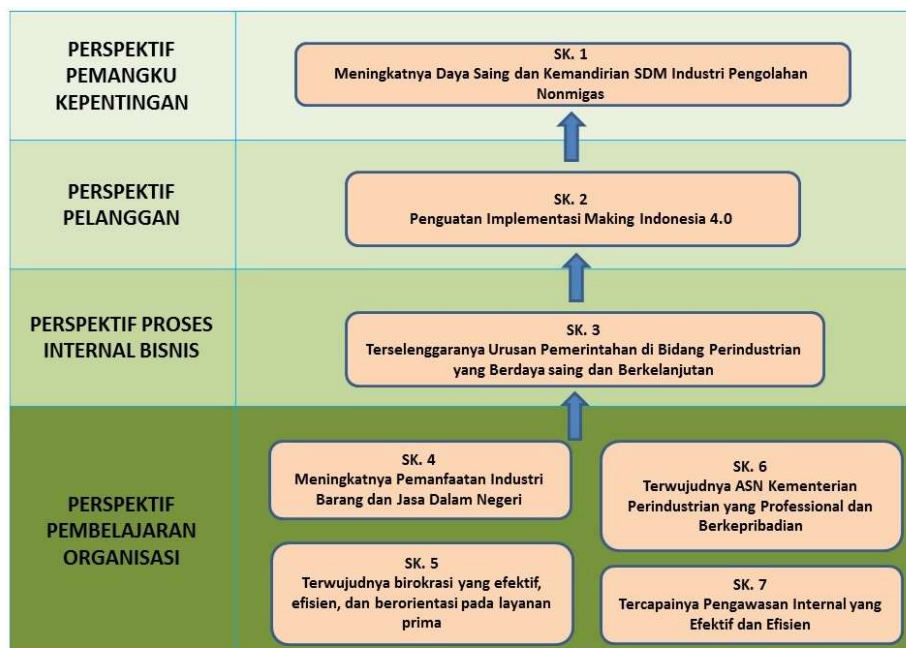
Tabel 2. Target Indikator Tujuan 2020-2024

Kode	Tujuan		Indikator Kinerja	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
TJ	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional	1	Tersedianya SDM Industri yang kompeten	210	238	372	240	214

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan SDM Industri BPSDMI merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BPSDMI sebagai suatu *impact/outcome* dari rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSDMI. Dalam penyusunannya, BPSDMI menjabarkan masing-masing sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Prespective*), Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*), Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*), dan Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*). Dengan metode dan perspektif yang sama Politeknik ATK Yogyakarta menyusun Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan. Sasaran Kegiatan tersebut dicapai melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Peta strategi Politeknik ATK Yogyakarta dapat di lihat pada gambar di bawah.

Gambar 14. Peta Strategis Politeknik ATK Yogyakarta Tahun 2020-2024



2.4.1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Prespective*)

Sasaran Kegiatan pertama (SK.1) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas”, dengan indikator kinerja:

1. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan, meningkat dari 73 persen pada tahun 2021 menjadi 82 persen pada tahun 2024.
2. Jumlah tenaga kerja industri yang kompeten, menyesuaikan dari 837 orang pada tahun 2020 menjadi 761 orang pada tahun 2024.

2.4.2. *Perspektif Pelanggan (Customer Perspective)*

Sasaran Kegiatan kedua (SK.2) yang akan dicapai adalah “Penguatan Implementasi *Making Indonesia 4.0*”, dengan indikator kinerja:

1. Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi, mulai tahun 2020 dengan target 1 implementasi. Pada tahun 2024 berubah indikator menjadi Nilai Technical and Vocational Education and Training (TVET) 4.0 dengan nilai 1,84.

2.4.3. *Perspektif Proses Internal (Internal Process Perspective)*

Sasaran Kegiatan ketiga (SK.3) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:

1. Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat, meningkat dari 2 perusahaan pada tahun 2021 menjadi 15 perusahaan pada tahun 2024.
2. Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik, mempertahankan nilai akreditasi dengan minimal nilai 300 pada tahun 2020 dan 301 pada tahun 2024.
3. Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional, meningkat dari 15 penelitian pada tahun 2020 menjadi 24 pada tahun 2024.
4. Inkubator Bisnis yang tumbuh, meningkat dari 1 tenant pada tahun 2023 menjadi 2 tenant pada tahun 2024

2.4.4. *Perspektif Pembelajaran Organisasi (Learning and Growth Perspective)*

Sasaran Kegiatan keempat (SK.4) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri”, dengan indikator kinerja:

1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker, meningkat dari 50 persen pada tahun 2021 menjadi 80 persen pada tahun 2024.

Sasaran Kegiatan kelima (SK.5) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima”, dengan indikator kinerja:

1. Nilai Laporan Keuangan, menyesuaikan dari nilai 80,5 pada tahun 2021 menjadi nilai 78 pada tahun 2024

2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyesuaikan dari nilai 70 pada tahun 2021 menjadi nilai 74 pada tahun 2024.
3. Nilai kearsipan Politeknik ATK Yogyakarta, menyesuaikan dari nilai 75 pada tahun 2023 menjadi nilai 75 pada tahun 2024.

Sasaran Kegiatan keenam (SK.6) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian”, dengan indikator kinerja:

1. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Satker, menyesuaikan dari indeks 71 pada tahun 2021 menjadi indeks 72 pada tahun 2024.

Sasaran Kegiatan ketujuh (SK.7) yang akan dicapai adalah “Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien”, dengan indikator kinerja:

1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti, menyesuaikan dari 91,5 persen pada tahun 2021 menjadi 92,2 persen pada tahun 2024.

BAB 3.

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pengembangan dan pembinaan pembina industri baik di tingkat pusat maupun daerah telah disusun oleh Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Kementerian Perindustrian. Sebagai unit kerja pelatihan yang dimiliki Kementerian Perindustrian, Politeknik dan Akademi Komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian diamanahkan untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi industri yang *excellence* dan berdaya saing global. Arah kebijakan yang diambil Politeknik ATK Yogyakarta dalam pelaksanaan pendidikan adalah sebagai berikut:

3.1.1. Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri *Dual System* Bertaraf Global Sebagai Referensi Model Pendidikan Vokasi Nasional

Politeknik ATK Yogyakarta dalam menjalankan Program *dual system* mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1151 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda Pada Unit Pendidikan Vokasi Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Sistem pendidikan *dual system* merupakan sistem pendidikan yang paling sesuai untuk pendidikan vokasi. Pengembangan pendidikan berstandar global di Indonesia untuk mewujudkan *World Class University (WCU)* sudah menjadi syarat yang mutlak untuk saat ini. Hal ini sejalan kebijakan Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan sumber daya manusia yang akan menopang untuk menuju Indonesia menjadi Negara Industri Maju di tahun 2035. Akreditasi/sertifikasi internasional menjadi bagian penting dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia.

Akreditasi, sertifikasi maupun asesmen internasional selain mempermudah mobilitas lulusan ke pasar kerja global, juga semakin membuka mobilitas bagi staf dan mahasiswa keseluruh dunia. Paradigma pentingnya akreditasi/sertifikasi internasional adalah menjadikan capaian pembelajaran, asesmen dan evaluasi pencapaiannya sebagai basis penjaminan mutu dan perencanaan strategi akademik bagi suatu institusi pendidikan.

Untuk mewujudkan Pendidikan bertaraf global tentunya sistem Pendidikan yang diselenggarakan pada Pendidikan vokasi industri kemenperin harus sejajar dengan sistem Pendidikan yang diterapkan di negara-negara maju. Di negara industri maju di Eropa, seperti Jerman, Austria, Belanda, dan lain-lain, pendidikan vokasi telah berkembang/dikembangkan sejak awal proses industrialisasi di negara yang bersangkutan. Di Indonesia, pendidikan vokasi sudah ada sejak lebih dari 150 tahun yang lalu, dan berkembang semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun perannya dalam membangun kualitas tenaga kerja relatif kecil dibandingkan dengan pendidikan

umum (akademik). Pasokan tenaga kerja terdidik sebagian besar berupa lulusan pendidikan akademik atau pendidikan umum.

Guna mendukung industrialisasi di Indonesia, Pendidikan vokasi diharapkan dapat menerapkan Pendidikan sistem ganda (*dual system education*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri. Penyelenggaraan pendidikan ini dapat membangunkan kesadaran pelaku dunia usaha dan dunia industri untuk turut mengambil tanggung jawab lebih besar, serta dapat mengisi lapangan kerja industri dengan profil lulusan yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan tinggi (*high skilled & know how*). Penyelenggaraan pendidikan vokasi harus berkolaborasi dengan industri dengan dualsystem menitik beratkan proses pembelajaran di dua tempat yaitu di sekolah/kampus dan industri.

3.1.2. Pembangunan Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) sebagai HUB dan Ecosystem Center Industri 4.0

Tuntutan Peran Politeknik ATK Yogyakarta sebagai salah satu pendidikan vokasi di Indonesia dalam menghadapi Era Industri 4.0 ataupun Society 5.0 menjadi pemicu dilaksanakan program penguatan showcase I 4.0 di Politeknik ATK Yogyakarta. Pada tahun 2021 Politeknik ATK Yogyakarta secara masif dibawah arahan BPSDMI Kemenperin mulai diberikan tugas sebagai showcase industri 4.0 untuk bidang manufacturing alas kaki. Sebagai respon terhadap era revolusi industri 4.0 yang sedang berjalan saat ini menuntut tenaga kerja industri untuk cepat beradaptasi dan mampu mengimplementasikan teknologi digital. Sehingga diperlukan adanya pembekalan keterampilan dasar, peningkatan keterampilan (*up-skilling*) atau pembaruan keterampilan (*re-skilling*) bagi para tenaga kerja yang didasarkan pada kebutuhan dunia industri saat ini.

Pembangunan Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) yang merupakan bagian implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0, menghadirkan lima pilar untuk mendukung industri dalam transformasi menuju industri 4.0. Pilar pertama, yaitu showcase, bertujuan meningkatkan awareness industri terhadap pentingnya penerapan industri 4.0. Selanjutnya, *capability center* untuk membangun keahlian teknologi industri 4.0. Ketiga, pilar ekosistem yang menghubungkan para stakeholders industri. Keempat, pilar delivery center dalam transformasi perusahaan industri untuk menerapkan teknologi 4.0. Terakhir, pilar kelima PIDI 4.0 juga memiliki pilar inovasi melalui berbagai proyek uji coba dan brokerage di sektor industri.

Untuk memperluas jangkauan dan manfaat PIDI 4.0 serta penguatan peran unit Pendidikan Kementerian Perindustrian dalam penyediaan tenaga kerja industri yang adaptif terhadap revolusi industri 4.0, dilakukan pembangunan satelit PIDI 4.0 pada beberapa Politeknik dengan *key technology* yang berbeda dan spesifik di setiap satelit. Satelit PIDI 4.0 akan menjalankan setidaknya 2 pilar layanan sebagaimana yang diselenggarakan oleh PIDI 4.0, yaitu sebagai showcase center dan *capability center* sesuai dengan spesialisasi industri di masing-masing Politeknik.

3.1.3. Pengembangan Kelembagaan Inkubator Bisnis Industri Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Industri

Politeknik ATK dalam menjalankan ketugasannya dan kegiatannya megacu pada Peraturan Menteri Perindustrian nomor 06/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATK Yogyakarta. Salah satu program yang dijalankan adalah menyelenggarakan inkubator bisnis untuk wirausaha kecil dan industri menengah. Program inkubator bsisnis ini sangat relevan diterapkan dalam kondisi pademi, sebagai salah satu alternatif kontribusi peningkatan ekonomi masyarakat. Pandemi COVID 19 berdampak sangat signifikan terhadap perekonomian nasional. Sebanyak lebih dari 3,5 juta tenaga kerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun dirumahkan (Kementerian Ketenagakerjaan, Juli 2020). Utilisasi industri pengolahan nonmigas pada Januari-Maret 2020 sebesar 76,29% mengalami penurunan signifikan menjadi 59,20% pada periode April-November 2020.

Mengatasi hal tersebut pemerintah telah menetapkan menyusun Progam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan sektor industri manufaktur sebagai pendorong utama. Beberapa program pemulihan ekonomi nasional yang didorong oleh Kementerian Perindustrian adalah program substitusi impor, program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta penumbuhan wirausaha baru. Saat ini tingkat kewirausahaan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Tingkat kewirausahaan Indonesia tercatat masih berada di angka 3,47%, di bawah Singapura hampir mencapai 9% atau Malaysia dan Thailand yang hampir mencapai 5%. Dibutuhkan setidaknya 4% jumlah wirausaha di Indonesia untuk bisa menjadi negara maju. Untuk itu pembentukan dan pengembangan wirausaha industri memerlukan intevensi dan dukungan dari pemerintah, tidak hanya dalam bentuk fasilitas peralatan dan pendanaan, tetapi yang lebih penting adalah pembentukan SDM wirausaha yang berdaya saing.

Peran pembentukan SDM Wirausaha Industri dapat dilakukan melalui penyelenggaraan Pendidikan vokasi industri pada Politeknik/Akademi Komunitas Kementerian Perindustrian, karena telah dilengkapi dengan laboratorium dan teaching factory yang dapat digunakan sebagai sarana inkubasi, sehingga selain meluluskan tenaga kerja kompeten Politeknik dan Akademi Komunitas juga perlu membentuk wirausaha. Pengembangan peran sebagai incubator bisnis tersebut tentunya perlu dilakukan dengan membangun kolaborasi dengan para stakeholder terkait, antara lain Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian, Balai Diklat Industri, Lembaga pembiayaan, serta asosiasi industri terkait.

3.1.4. Pembangunan Digital ASN dan *Knowledge Management Center* Sebagai Pusat Pembinaan ASN Pembina Industri

Optimalisasi kegiatan dan program pada Proses Bisnis pada Politeknik ATK Yogyakarta merupakan salah satu arah kebijakan yang telah dan akan dijalankan. Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan salah satu fokus yang harus selalu dikembangkan. Khususnya untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi Dosen dan

Tenaga kependidikan khususnya ASN berkaitan literasi dan kemampuan digital dan penguasaan teknologi informasi yang nantinya siap mendukung transformasi birokrasi digital di era industri 4.0 dan Society 5.0.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa pembangunan SDM industri meliputi pembangunan pembina industri yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi di bidang industri. ASN bidang industri merupakan pemeran utama dalam pembangunan industri yang berdaya saing global di era revolusi industri 4.0. Untuk itu, pembangunan ASN pembina industri sebagai digital ASN perlu disiapkan dan diprioritaskan untuk menopang industri 4.0.

SDM aparatur bidang industri diharapkan dapat menjadi digital ASN yang nantinya siap mendukung transformasi birokrasi digital di era revolusi industri 4.0. Dalam rangka mendukung pembangunan Digital ASN 2020-2024 yang inovatif, adaptif, dan progresif, program pengembangan tidak cukup hanya dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan tradisional yang selama ini dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih strategis serta optimalisasi sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi dalam proses pembelajarannya. Kebutuhan ini dapat diakomodasi melalui perwujudan *Corporate University* BPSDMI Kementerian Perindustrian.

3.1.5. Pembangunan wadah (*HUB Center*) sinergi, kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder nasional dan global dalam mengembangkan vokasi industri

Networking dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi dengan segenap *stakeholder* internal maupun eksternal selalu ditingkatkan (kuantitatif maupun kualitatif) baik dalam bentuk *MoU* maupun pelaksanaan kerjasama dan realisasi kerjasamanya. Platform yang digunakan dapat dalam bentuk *triple* helik (Akademisi, Pemerintah dan Industri) maupun dalam bentuk pentahelik *(Akademisi, pemerintah, Industri, Komunitas Masyarakat dan Media) dalam kerangka benefit sharing (mutualism sharing)

3.1.5.1 Pengembangan sinergi kolaborasi dan kerjasama dengan stakeholder

Pengembangan vokasi industri tidak lepas dari peran serta dunia usaha industri, pemerintah dan masyarakat. Menyatukan dunia pendidikan dan dunia industri dalam pendidikan vokasi industri memerlukan sinergi antar stakeholder yang terlibat. Sebagai contohnya untuk sektor industri manufaktur, Kementerian Perindustrian memiliki peran strategis dalam mendorong pelaku usaha dan industri aktif melakukan pembinaan pendidikan vokasi industri. Adanya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dan ditindak lanjuti oleh Menperin dengan membuat Nota Kesepahaman 5 (lima) Menteri yaitu Mendikbud, Menperin, Meristekdikti, Menaker dan Menteri BUMN merupakan model sinergi dan kolaborasi yang terus dilakukan. Untuk pengembangan pendidikan vokasi di sektor industri lainnya, akan memerlukan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian teknis lainnya. Oleh sebab itu kolaborasi dan dukungan dari masing-masing sektor terkait sesuai dengan perannya masing-masing diperlukan dalam pengembangan pendidikan vokasi industri.

Upaya lanjutan setelah terbangun kesepahaman antar stake holder yaitu Kementerian, Pemerintah daerah dan pelaku dunia industri maupun masyarakat dalam implementasi kolaborasi dan sinergi pembinaan program vokasi industri. Untuk sektor industri kegiatan pembinaan pendidikan vokasi industri dapat mengacu pada Permen Perindustrian Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi Yang Link and Match dengan Industri. Kegiatan sinergi dan kolaborasi antar stake holder yang dapat dilakukan berupa penyusunan kurikulum sesuai kebutuhan industri, pembinaan guru bidang produktif melalui pelatihan dan magang di industri, pemanfaatan karyawan purna bakti sebagai guru produktif, pelatihan pedagogik, penyediaan *teaching factory*, workshop dan atau laboratorium di SMK, penyediaan infrastruktur kompetensi mulai dari SKKNI, LSP, TUK, asesor kompetensi, penyelenggaraan uji kompetensi, penyelenggaraan praktek kerja dan pemagangan industri serta pemberian insentif bagi perusahaan yang melakukan pembinaan program vokasi industri.

Kementerian Perindustrian melalui BPSDMI menjadi leading inisiatif untuk sektor industri manufaktur dalam pengembangan link and match antara dunia industri dan dunia pendidikan dengan menkoordinasikan dan menjadi inspirasi guna mendorong peran aktif sektor terkait.

3.1.5.2 Memperkuat kerjasama luar negeri bidang vokasi industri

Kerja sama dengan mitra luar negeri bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik institusi dan sumber daya manusia yang kompetitif dalam membangun kebersamaan regional dan internasional untuk pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Kerja sama kelembagaan tersebut dapat dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Politeknik, Akademi Komunitas, maupun Sekolah Menengah Kejuruan yang tertuang dalam nota kesepahaman, dan disusun berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) kejelasan tujuan dan hasil;
- 2) saling menghormati dan menguntungkan;
- 3) profesionalitas;
- 4) keterlibatan berbagai pihak yang dipandang perlu dan
- 5) berkepentingan secara proaktif;
- 6) pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- 7) pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan;
- 8) basis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan
- 9) kesetaraan mutu kelembagaan.

Penyusunan kerja sama dengan mitra luar negeri dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- Tahap penjajakan (*preliminary Process*) yaitu menemukenali berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian yang akan di buat. Pihak pemrakarsa mengusulkan perjanjian kerja sama dan melakukan koordinasi dengan Ditjen KPAII dan Biro Hukum Kementerian Perindustrian.
- Tahap perundingan (*Negotiating process*) yaitu masing-masing pihak mengajukan penawaran kerja sama sehingga tercapai suatu kesepakatan,
- Tahap perumusan naskah kesepahaman (*Drafting process*) yaitu menuliskan klausul kerja sama dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar untuk menghindari multi inteprestasi.
- Tahap penerimaan (*acceptance process*) yaitu penerimaan dokumen kesepahaman melalui koordinasi dengan pihak terkait
- Tahap penandatanganan (*signing process*) yaitu membubuhkan paraf pada kedua belah pihak dalam dokumen kesepahaman dan melakukan penandatanganan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Ruang lingkup kerja sama Luar Negeri yang dilaksanakan dengan mitra luar negeri terdiri atas:

- 1) penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
- 2) penyelenggaraan kerja sama di bidang akademik, seperti petukaran mahasiswa (*student exchange*), pertukaran dosen dan/atau tenaga kependidikan peneliti; program gelar ganda (*double degree*), dan program-program kembar yang lain.
- 3) penyelenggaraan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, seperti riset bersama (*joint research*), seminar bersama, penerbitan karya ilmiah terakreditasi bersama dan lain-lain;
- 4) penyelenggaraan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- 5) penyelenggaraan kerja sama di bidang kontrak manajemen dan audit pengelolaan pendidikan;
- 6) penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sarana dan prasarana; dan
- 7) bentuk kerja sama komersial lain yang belum tertuang dalam buku pedoman ini.

Kewajiban yang harus dilakukan setelah penandatanganan persetujuan nota kesepahaman dengan mitra luar negeri, berupa tindak lanjut teknis kegiatan dan evaluasi efektifitas pelaksanaan yang dilakukan secara berkala.

3.2. Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, dan mendorong dalam rangka mencapai tujuan

berbangsa dan bernegara. Adapun beberapa regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Direktur tentang Penerima Beasiswa Akademik dan Non Akademik.
2. Surat Keputusan Direktur tentang Keringanan SPP Mahasiswa .
3. Surat Keputusan Direktur tentang SOP Evaluasi Kegiatan dan Program.
4. Surat Keputusan Direktur tentang Pemberian *Reward and Punishment*.

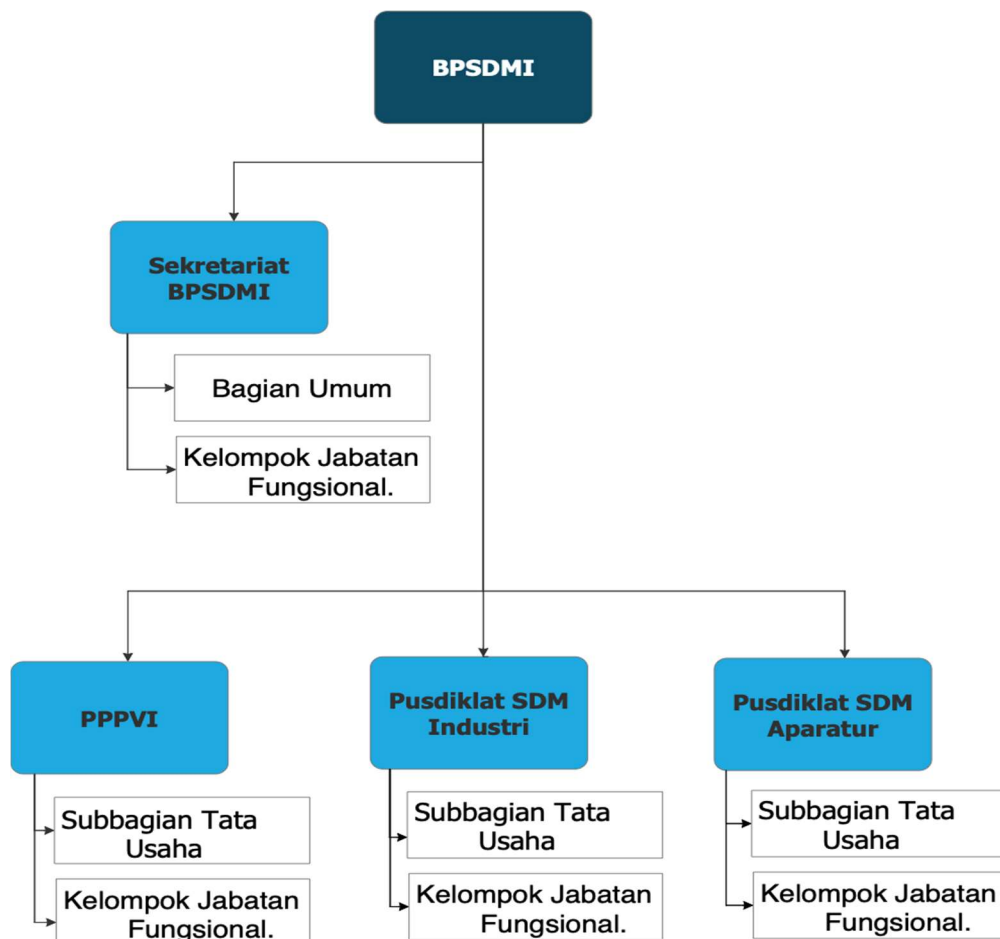
3.3. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 06/M-IND/PER/1/2015 tanggal 5 Januari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATK Yogyakarta, Politeknik ATK Yogyakarta mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang teknologi kulit dan produk kulit. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Politeknik ATK Yogyakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program pendidikan vokasi di bidang teknologi kulit dan produk kulit;
- b. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang teknologi kulit dan produk kulit;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungan alumni;
- e. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;
- f. Pengelolaan inkubator bisnis;
- g. Pengelolaan pabrik dalam sekolah (teaching factory);
- h. Pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, pemagangan, dan penempatan kerja;
- i. Pengelolaan perpustakaan, laboratorium / workshop, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
- j. Pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerjasama;
- k. Pengelolaan keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, dan kepegawaian;

- l. Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- m. Pelaksanaan pengawasan internal; dan
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Adapun sebagai bagian dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dan Pusat Pengembangan Pendidikan dan Vokasi Industri (PPPVI), posisi dan struktur Politeknik ATK Yogyakarta berada dibawah PPPVI sebagai berikut:



Gambar 15. Struktur Kelembagaan BPSDMI

Sumber: Diolah dari Permenperin 7/2021

BAB 4.

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024, Politeknik ATK Yogyakarta akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi BPSDMI. Sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome / impact*) dari satu atau beberapa program. Berikut ini Indikator Kinerja Sasaran Strategis Politeknik ATK Yogyakarta 2020-2024:

Tabel 3. Target Kinerja Politeknik ATK Yogyakarta 2020-2024

PERSPEKTIF STAKEHOLDER									
Kode	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target					Satuan
				2020	2021	2022	2023	2024	
SK 1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	1	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan *	70	73	75	76	82	Persen
		2	Tenaga kerja industri yang kompeten	837	1.145	1.191	1.009	761	Orang
PERSPEKTIF CUSTOMER									
Kode	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target					Satuan
				2020	2021	2022	2023	2024	
SK 2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi / Nilai Technical and Vocational Education and Training (TVET) 4.0	1	2	2	1	1,84	Implem entasi
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL									
Kode	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target					Satuan
				2020	2021	2022	2023	2024	
SK 3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	15	2	3	4	15	Perusah aan
		2	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	300	300	312	301	301	Nilai
		3	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	15	15	20	22	24	Penelitian
		4	Inkubator Bisnis yang tumbuh	-	-	-	1	2	Tenant
PERSPEKTIF LEARN & GROWTH									
Kode	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target					Satuan
				2020	2021	2022	2023	2024	
SK 4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan	0	50	60	70	80	Persen

	Barang dan Jasa Dalam Negeri		barang dan jasa di Politeknik ATK Yogyakarta*						
SK 5	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1	Nilai Laporan Keuangan Politeknik ATK Yogyakarta	80	80,5	81	76	78	Nilai
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Politeknik ATK Yogyakarta	65	70	71	72	74	Nilai
		3	Nilai Kearsipan Politeknik ATK Yogyakarta	-	-	-	75	75	
SK 6	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	1	Rata-rata Indeks Kompetensi, professional ASN Politeknik ATK Yogyakarta	70	71	73	71	72	Indeks
SK 7	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	90	91,5	92	92	92,2	Persen

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat hukum yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu kegiatan. Indikator kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di BPSDMI merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan.

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dari Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja di atas Politeknik ATK Yogyakarta menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan.
2. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Politeknik ATK Yogyakarta.

4.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun sebagai dasar penentuan kebutuhan anggaran dalam rangka pencapaian target yang telah ditentukan tahun 2020 - 2024. Kebutuhan anggaran di Politeknik ATK Yogyakarta menggunakan dua sumber yakni APBN dalam bentuk rupiah murni dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Kebutuhan anggaran selama lima tahun sebagai berikut :

Tabel 4. Kerangka Pendanaan Politeknik ATK Yogyakarta 2020-2024

No	Kegiatan	Anggaran (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
4958.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	888.927.000	307.490.000	711.975.000	1.048.543.000	1.448.449.000
4958.RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	-	9.546.474.000	-	-	-
4958.RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	-	2.010.750.000	-	500.000.000	2.029.295.000
4958.SAG	Pendidikan Vokasi Bidang Industri	6.345.221.000	5.419.139.000	7.102.245.000	6.152.586.000	6.085.147.000
6043.EBA	Layanan Perkantoran	23.399.542.000	21.464.450.000	25.071.275.000	24.084.134.000	23.145.774.000
6043.EBD	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2.052.500.000	1.278.355.000	1.432.560.000	1.205.306.000	1.147.995.000
6043.EAD	Layanan Sarana Internal	-	83,400.000	-	-	-

BAB 5.

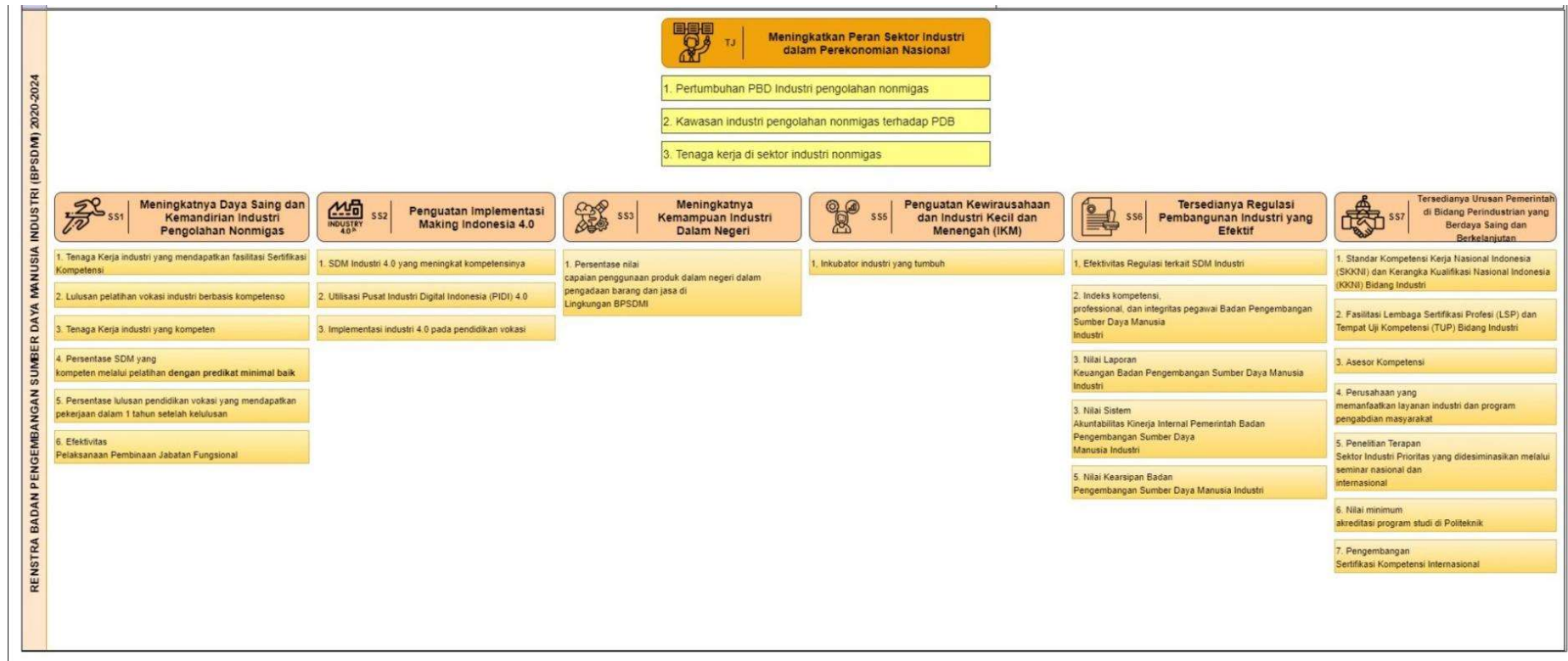
PENUTUP

Rencana Strategis Politeknik ATK Yogyakarta dibawah Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri tahun 2020-2024 merupakan rencana kerja jangka menengah yang disusun berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Rencana strategis tersebut juga merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja dalam upaya untuk mencapai visi dan misi selama lima tahun. Penyusunan Renstra dilakukan secara sistematis, komprehensif, integratif, dan sinergis dengan menggunakan alat bantu Peta Strategi dan *Key Performance Indicator* (KPI) agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri akan direviu secara berkala setiap tahunnya dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan kebijakan.

Kegiatan-kegiatan tahunan telah disusun dan direncanakan berdasarkan kondisi lingkungan saat ini. Oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu pelaksanaan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat diperkaya sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada ketika menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Renstra ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kejelasan terhadap tahap-tahap pencapaian visi dan misi Politeknik ATK Yogyakarta.

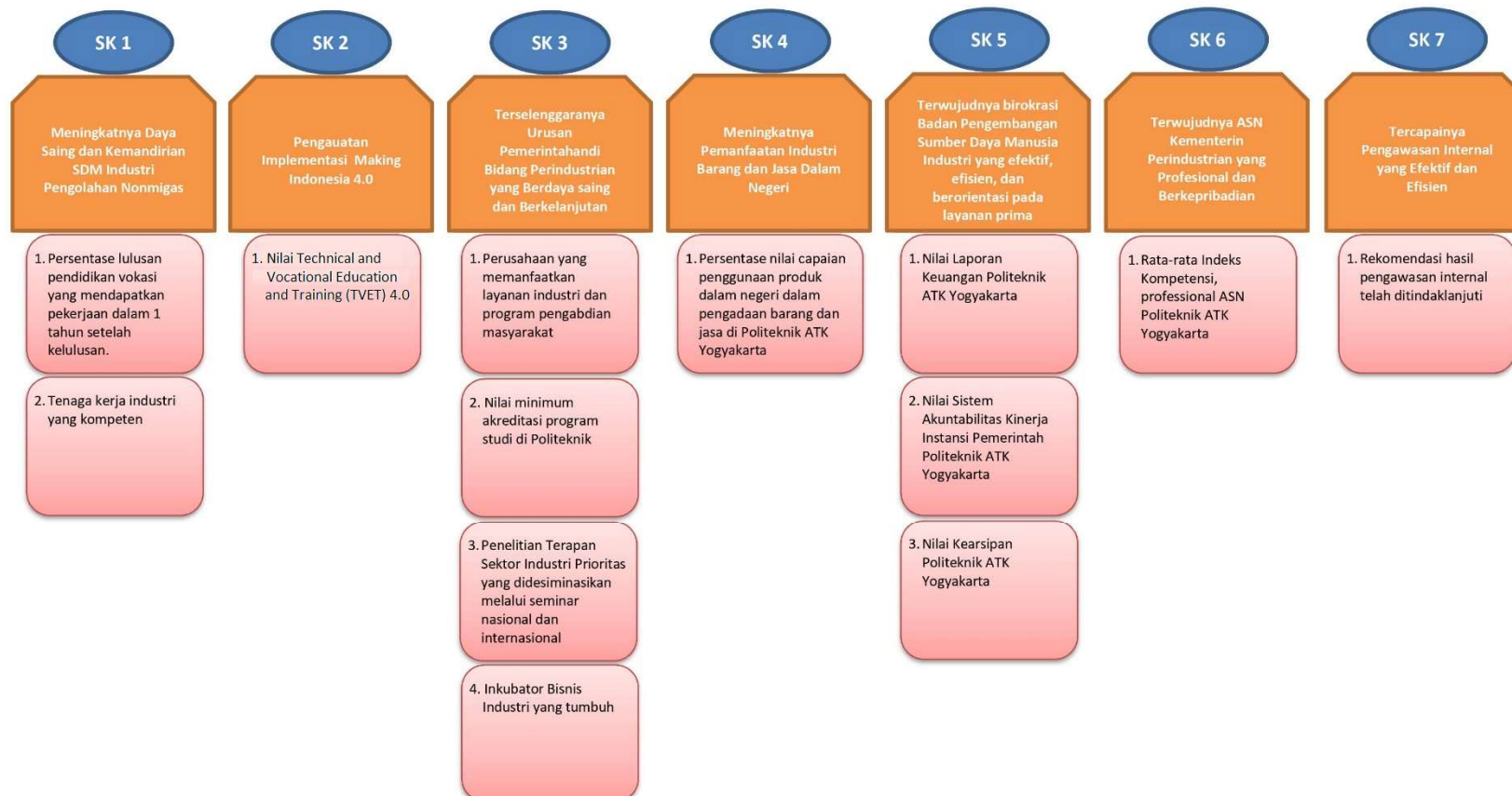
LAMPIRAN

Lampiran 1: Pohon Kinerja



TJ Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional

Tersedianya SDM Industri yang kompeten



Lampiran 2: Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Kerja

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK 1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	1. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (IKU)	731.968.000	240.959.000	500.220.000	355.311.000	493.908.000
		2. Tenaga kerja industri yang kompeten	5.166.729.000	4.806.585.000	6.196.725.000	5.133.729.000	4.925.288.000
SK 2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Nilai Technical and Vocational Education and Training (TVET) 4.0	63.955.000	9.582.379.000	64.805.000	58.905.000	42.400.000
SK 3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	1. Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	288.930.000	173.280.000	217.830.000	263.475.000	270.052.000
		2. Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	2.837.559.000	4.677.398.000	2.577.396.000	4.018.450.000	6.078.308.000
		3. Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	613.034.000	203.090.000	523.600.000	387.200.000	491.551.000
		4. Inkubator Bisnis Industri yang tumbuh	-	-	-	242.991.000	246.510.000
SK 4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Politeknik ATK Yogyakarta (IKU)	73.950.000	4.410.000	24.960.000	27.060.000	28.340.000
SK 5	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1. Nilai Laporan Keuangan Politeknik ATK Yogyakarta	212.866.000	177.960.000	136.630.000	119.894.000	106.844.000
		2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Politeknik ATK Yogyakarta	34.558.000	9.320.000	18.140.000	44.397.000	57.180.000
		3. Nilai kearsipan Politeknik ATK Yogyakarta				1.258.594.000	1.181.494.000

SK 6	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	1. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Politeknik ATK Yogyakarta	20.138.506.000	17.853.532.000	21.504.855.000	20.823.638.000	19.684.475.000
SK 7	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	1.202.496.000	1.290.180.000	1.388.974.000	256.925.000	250.310.000

Lampiran 3: Matrik Keterkaitan antara Aktivitas/Kegiatan, KRO, RO, Indikator Kinerja, dan Sasaran Strategis

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan / KRO / RO / Komponen	Komponen/ Subkomponen
1	2	3		6
SK 1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	1.1 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (IKU)	4958.FAI.001.054	1). Kerjasama Industri,
			4958.SAG.001.051	1). Kegiatan Pengembangan Kepribadian Mahasiswa,
			4958.SAG.001.056	2). Career Development Center dan Tracer Study,
		1.2 Tenaga kerja industri yang kompeten		3). Silver Expert,
			4958.SAG.001.051	1). Penerimaan Mahasiswa Baru,
				2). Penyelenggaraan Pendidikan Program D3,
SK 2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	2.1 Nilai Technical and Vocational Education and Training (TVET) 4.0		3). Penyelenggaraan Pendidikan Program D4 (Sarjana Terapan),
				4). Pelaksanaan Pameran dan Lomba,
				5). Menyelenggarakan Pembelajaran Dual Sistem (Pilot Project),
			4958.SAG.001.054	6). Pelaksanaan Sertifikasi Lulusan Reguler,
				7). Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi,
				8). Pengembangan Tempat Uji Kompetensi.
SK 3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	3.1 Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	4958.SAG.002.051	9). Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma 1,
		3.2 Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	4958.FAI.001.053	1). Penyelenggaraan Kerjasama Implementasi Industri 4.0.
			4958.FAI.001.053	1). Pengabdian Masyarakat, dan
			6043.EBD.002.052	2). Teaching Industry / Factory,
				3). Layanan Publik
			4958.FAI.001.051	1). Akreditasi Perguruan Tinggi,
			4958.SAG.001.051	2). Penggandaan Buku Perpustakaan dan Sewa E-Jurnal,
				3). Pengelolaan Pengolahan Limbah Kulit
			4958.RBJ.001.058	4). Pembangunan Gedung
			4958.RBJ.002.059	5). Pengadaan Peralatan dan Mesin
			6043.EBA.994.002	6). Peningkatan Kesehatan Pegawai
				7). Pengadaan Pakaian Laboran, Satpam dan Supir
				8). Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Akademi
				9). Operasional Jasa Perkantoran
				10).Jasa Keamanan

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan / KRO / RO / Komponen	Komponen/ Subkomponen
1	2	3		6
				11).Jasa Pos / Giro / Sertifikat
		3.3 Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	4958.FAI.001.051	1). Jurnal Ilmiah dan Penerbitan Handbook
			4958.FAI.001.052	2). Penelitian Dosen, dan
			6043.EBD.002.052	3). Pengelolaan Kegiatan HKI.
		3.4 Inkubator Bisnis industri yang tumbuh	4958.SAG.001.055	Inkubator Bisnis
SK 4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	4.1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Politeknik ATK Yogyakarta (IKU)	6043.EBD.002.051	Penyusunan dan Pembahasan Anggaran (RKA-KL).
SK 5	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	5.1 Nilai Laporan Keuangan Politeknik ATK Yogyakarta	6043.EBD.002.053	1). Pelaporan SAI, dan
		5.2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Politeknik ATK Yogyakarta	6043.EBD.002.052	2). Pengelolaan Persediaan dan Pengelolaan Aset.
		5.3 Nilai kearsipan Politeknik ATK Yogyakarta	6043.EBA.994.001	1). Laporan Tahunan
			6043.EBD.002.052	1). Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
SK 6	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	6.1 Rata-rata index profesionalitas ASN	4958.FAI.001.054	2). Penatalaksanaan Kearsipan
			6043.EBA.994.001	1). Penyelenggaraan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri,
			6043.EBD.002.054	2). Pembayaran Gaji dan Tunjangan,
				3). Administrasi Kepegawaian,
				4). Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai dan Penguatan Pertimbangan Kelembagaan,
				5). Penilaian Angka Kredit,
				6). Diklat Peningkatan Kompetensi Dosen,
				7). Diklat Peningkatan Kompetensi Laboran / PLP,
				8). Diklat Peningkatan Kompetensi Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum,
SK 7	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	7.1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	6043.EBD.002.051	1). Koordinasi Pimpinan,
			6043.EBD.002.052	2). Satuan Pengendalian Internal Pemerintah
				3). Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA									
Sasaran Strategis	SS.1	Meningkatannya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas							
Indikator Kinerja SS	SS1.7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (IKU)	PPVI	Persen	50	77	79	81	83
Sasaran Kegiatan	SK 1	Meningkatannya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Poltek ATK Yogyakarta						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK1.1	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Poltek ATK Yogyakarta	Persen	70	73	75	76	82
	SK1.2	Tenaga kerja industri yang kompeten	Poltek ATK Yogyakarta	Orang	837	1.145	1.191	1.009	761
Sasaran Strategis	SS.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0							
Indikator Kinerja SS	SS2.5	SDM Industri 4.0 yang meningkatkan kompetensinya	Pusdiklat SDM Industri	Orang	400	400	400	400	400
Sasaran Kegiatan	SK 2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Poltek ATK Yogyakarta						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK2.1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi / Nilai Technical and Vocational Education and Training (TVET) 4.0	Poltek ATK Yogyakarta	Implementasi	1	2	2	1	1,84
Sasaran Strategis	SS.8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan							
Indikator Kinerja SS	SS8.2	Infrastruktur kompetensi industri	Pusdiklat SDM Industri	SKKNI	8	10	10	10	10
Sasaran Kegiatan	SK 3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	Poltek ATK Yogyakarta						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK.3.1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	Poltek ATK Yogyakarta	Perusahaan	15	2	3	4	15
	SK.3.2	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Poltek ATK Yogyakarta	Nilai	300	300	312	301	301

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	SK.3.3	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Poltek ATK Yogyakarta	Peneliti an	15	15	20	22	24
	SK.3.4	Inkubator Bisnis Industri yang tumbuh	Poltek ATK Yogyakarta	Tenant	-	-	-	1	2
Sasaran Strategis	SS.3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa serta Industri Halal dalam negeri							
Indikator Kinerja SS	SS3.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin	Seluruh Eselon II	Persen	-	75	80	85	90
Sasaran Kegiatan	SK.4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Poltek ATK Yogyakarta						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK4.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker	Poltek ATK Yogyakarta	Persen	-	50	60	70	80
Sasaran Strategis	SS.13	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian							
Indikator Kinerja SS	SS13.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Seluruh Eselon II	Nilai	78	78.2	78.4	78.6	78.8
Sasaran Kegiatan	SK.5	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Poltek ATK Yogyakarta						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK5.1	Nilai Laporan Keuangan Satker	Poltek ATK Yogyakarta	Nilai	80	80,5	81	76	78
	SK5.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satker	Poltek ATK Yogyakarta	Nilai	65	70	71	72	74
	SK5.2	Nilai Kearsipan Satker	Poltek ATK Yogyakarta	Nilai	-	-	-	75	75

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA									
Sasaran Strategis	SS.10	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian							
Indikator Kinerja SS	SS10.1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	Set BPSDMI	Indeks	70	71	73	76	80
Sasaran Kegiatan	SK 6	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	Poltek ATK Yogyakarta						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK6.1	Rata-rata Indeks Kompetensi, professional ASN Satker	Poltek ATK Yogyakarta	Persen	70	71	73	71	72
Sasaran Strategis		Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian							
Indikator Kinerja SS	SP5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh Eselon II	Level	3	3	3	4	4
Sasaran Kegiatan	SK 7	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Poltek ATK Yogyakarta						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK.7.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Poltek ATK Yogyakarta	Persen	90	91,5	92	92	92,2
	SK.7.2	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Poltek ATK Yogyakarta	Level	3	3	3	-	-

Lampiran 4: Pedoman Kinerja

1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas						
IK.1	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	NA	70	73	75	76	82
DEFINISI/DESKRIPSI							
Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan prasyarat terwujudnya industri nasional yang mandiri, maju, dan berdaya saing. Tantangan perkembangan ekonomi internasional tidak lagi terbatas pada perdagangan komoditi tetapi juga pasar bebas tenaga kerja. Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi serta pemagangan. Pendidikan vokasi yang diadakan oleh BPSDMI meliputi Pendidikan tinggi (Politeknik dan Akademi Komunitas), program pendidikan setara D1, dan Pendidikan Menengah (SMK). Outputnya berupa jumlah lulusan. Lulusan yang terserap meliputi yang bekerja di industri, berwirausaha, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Persentase lulusan yang terserap ditargetkan untuk meningkat setiap tahunnya dengan strategi meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. Persentase lulusan yang terserap dihitung paling lama satu tahun setelah dinyatakan lulus pada tahun sebelumnya (tahun-1).							
SUMBER DATA							
Data persentase lulusan tahun sebelumnya dari masing-masing satuan kerja Pendidikan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah lulusan yang terserap dibagi jumlah seluruh lulusan pada tahun sebelumnya dikali 100%.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Subbag Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, CDC dan Prodi					

2. Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas						
IK 2	Tenaga kerja industri yang kompeten	NA	837	1.145	1.191	1.009	761
DEFINISI/DESKRIPSI							
Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan prasyarat terwujudnya industri nasional yang mandiri, maju, dan berdaya saing. Tantangan perkembangan ekonomi internasional tidak lagi terbatas pada perdagangan komoditi tetapi juga pasar bebas tenaga kerja. Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi serta pemagangan. Penyelenggaraan Pendidikan vokasi yang diadakan oleh BPSDMI meliputi Pendidikan tinggi (Politeknik dan Akademi Komunitas), dan program pendidikan setara D1, yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi. Indikator kinerja jumlah tenaga kerja industri yang kompeten dihitung dari jumlah peserta didik aktif tersebut pada akhir tahun ajaran dari setiap satuan kerja Pendidikan.							
SUMBER DATA							
Data prosentase lulusan tahun sebelumnya dari masing-masing satuan kerja Pendidikan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah peserta didik aktif pada akhir tahun ajaran.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Orang	Maksimasi	Subbag Administri Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Dan Prodi					

3. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0						
IK.1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi / Nilai Technical and Vocational Education and Training (TVET) 4.0	NA	1	2	2	1	1,84
DEFINISI/DESKRIPSI							
Implementasi industri 4.0 memiliki peluang berupa 20 juta lapangan pekerjaan baru serta tantangan re-skilling dan upskilling tenaga kerja mencapai 6 hingga 29 juta pekerjaan pada tahun2030. Mengantisipasi hal ini, pengembangan Pendidikan vokasi harus mampu mengadaptasi perubahan melalui pengembangan dan implementasi kurikulum industri 4.0 dalam penyelenggaraan Pendidikan. Jenis-jenis implementasi industry 4.0 Pada Pendidikan vokasi adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan Satelit PIDI 2. Implementasi Kurikulum industri 4.0 3. Pengaplikasian teknologi industri 4.0 pada Pendidikan 4. Pelatihan Industri 4.0 pada SDM Industri.							
SUMBER DATA							
Data implementasi industri 4.0 pada satuan kerja							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah implementasi							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Implementasi	Maksimasi	Unit Transformasi Digital 4.0					

4. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan						
IK.3.1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	NA	15	2	3	4	15
DEFINISI/DESKRIPSI							
Dalam upaya pengembangan kompetensi, unit pendidikan diharapkan dapat terlibat pengembangan ekosistem industri, dilakukan kerja sama dengan pola saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kerja sama ini menjadi kebijakan penting bagi unit pendidikan dalam rangka untuk: 1. menggali dan memahami kebutuhan dan permasalahan masyarakat yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan; 2. pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan diutamakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pemanfaatan hasil penelitian secara konkret; 3. mendapatkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang memadai. Jenis kerja sama dan pengabdian masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh industry pada Unit Pendidikan adalah sebagai berikut: 1. Pendampingan teknologi; 2. Pendidikan dan Pelatihan; 3. Pelayanan konsultasi industri; 4. Penyuluhan; 5. Pemanfaatan Workshop/Laboratorium/Teaching Factory.							
SUMBER DATA							
Data perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dengan unit kerja Pendidikan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dengan unit kerja Pendidikan di akhir Tahun							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Perusahaan	Maksimasi	UPPM, Prodi & Humas dan Kerjasama					

5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan						
IK.2	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	NA	300	300	312	301	301
DEFINISI/DESKRIPSI							
Akreditasi program studi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarmaperguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Nilai minimum akreditasi program studi di politeknik adalah nilai terkecil dari beberapa Nilai akreditasi program studi yang terdapat pada satker dan masih berlaku.							
SUMBER DATA							
Sertifikat Akreditasi dan Surat Keputusan (SK) dari Lembaga akreditasi							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai terkecil dari beberapa Nilai akreditasi program studi							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimasi	SPM/Prodi					

6. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan						
IK.3	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	14	15	15	20	22	24
DEFINISI/DESKRIPSI							
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan kewajiban penelitian tersebut perguruan tinggi dituntut untuk memiliki dosen yang kompeten serta mampu menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, mendiseminasikan hasil penelitian dan pada akhirnya menghasilkan berbagai proses dan produkteknologi, seni, dan budaya yang berujung antara lain pada Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu penelitian. Revolusi Industri 4.0 atau Fourth Industry Revolution (4IR) yang telah digaungkan selama beberapa tahun terakhir tak hanya fokus pada pengembangan sektor industri. Lebih dari itu, revolusi industri juga memengaruhi berbagai bidang kehidupan, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, peningkatan keterampilan berbasis teknologi, serta persaingan di kancahperdagangan internasional. Peningkatan kualitas SDM bisa diwujudkan melalui penelitian terapan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Target penerapan hasil penelitian oleh Politeknik dan Akademi Komunitas adalah publikasi hasilpenelitian melalui tulisan ilmiah prosiding seminar nasional / internasional, serta jurnal ilmiah nasional terakreditasi / bereputasi internasional.							
SUMBER DATA							
Data Artikel penelitian yang sudah terpublikasi.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah data artikel penelitian yang sudah terpublikasi.							
SATUAN		KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA				
Penelitian		Maksimasi	UPPM & Program Studi				

7. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri						
SK.4.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker	NA	0	50	60	70	80
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salahsatu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Satker Politeknik.							
SUMBER DATA							
Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeridalam pengadaan barang dan jasa di Politeknik diperoleh melalui rumus: $R_{P3DN} = \frac{RAP_{3DN}}{TotAP_{3DN}}$ Ket: RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Kemenperin RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN. TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Subbag Umum dan Keuangan					

8. Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.5	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0						
SK.5.1	Nilai Laporan Keuangan Satker	NA	80	80,5	81	76	78
DEFINISI/DESKRIPSI							
Laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan kementerian perindustrian wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan kementerian perindustrian bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerjadan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tepat waktu.							
SUMBER DATA							
Nilai Laporan Keuangan berasal dari Biro Keuangan kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Penilaian Laporan Keuangan dari Biro Keuangan Kementerian Perindustrian dengan lingkup yang dinilai antara lain: Kelengkapan Laporan Keuangan yang meliputi (penjelasan umum, penjelasan laporan operasional, penjelasan laporan perubahan ekuitas, pengungkapan penting lainnya), kelengkapan lampiran meliputi (lampiran BMN dan Lapiramn E Rekon).							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimasi	Subbag Umum dan Keuangan					

9. Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.5	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima						
IK.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satker	NA	65	70	71	72	74
DEFINISI/DESKRIPSI							
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasiakuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.Penilaian SAKIP Politeknik dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.							
SUMBER DATA							
Data Nilai SAKIP Politeknik dari Inspektorat Jendral							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan nilai SAKIP Politeknik menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Subbag Umum dan Keuangan					

10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.6	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian						
IK. 1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	NA	70	71	73	71	72
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian Perindustrian							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur SipilNegara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); d. 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah).							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Indeks	Maksimasi	Seluruh Unit Pusat dan Satuan Kerja Daerah					

11. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.7	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
IK. 1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	NA	90	91,5	92	92	92,2
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internaltidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.							
SUMBER DATA							
Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, <i>database</i> Itjen							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dihitung melalui perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasihasil pengawasan.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Seluruh Unit Pusat dan Satuan Kerja Daerah					

12. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.7	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
IK. 2	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	NA	-	3	3	-	-
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi. Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui IndeksManajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.							
SUMBER DATA							
- Penilaian mandiri level MRI; dan - Nilai final level MRI dari hasil <i>Quality Assurance</i> oleh BPKP.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antarlain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko diinstansi tersebut.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Level	Maksimasi	Subbag Umum dan Keuangan					

13. Nilai Kearsipan Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.7	Terwujudnya birokrasi BPSDMI yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima						
IK. 2	Nilai Kearsipan Satker	NA	-	-	-	75	75
DEFINISI/DESKRIPSI							
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai arsip adalah nilai kegunaan yang terkandung di dalam arsip yang didasarkan atas kepentingan pengguna arsip itu sendiri. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan mengikuti acuan Perka ANRI No 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan dan dapat menyesuaikan mengikuti perubahan peraturan perundangan yang berlaku.							
SUMBER DATA							
Data nilai kerarsipan dari Biro Umum dan Anri							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Penilaian Portofolio dengan indikator : Penciptaan Arsip, Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip, Penyusutan Arsip, SDM Kearsipan, Alokasi Anggaran Kearsipan.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimasi	Subbag Umum dan Keuangan dan Unit Kearsipan					

Lampiran 5: Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
1	Surat Keputusan Direktur tentang Penerima Beasiswa Akademik dan Non Akademik	PP Tarif PNB	Politeknik ATK Yogyakarta	- Program Studi - Sub Bagian Adm. Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama - Bagian Keuangan	2022
2	Surat Keputusan Direktur tentang Penyusunan Kurikulum Berbasis STEM	Keputusan Menteri Perindustrian No. 1009 Tahun 2021 tentang Pengembangan Vokasi Industri Bertaraf Global Menuju Corporate University BPSPDMI Kementerian Perindustrian	Politeknik ATK Yogyakarta	- Program Studi - Sub Bagian Adm. Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama - BPSPDMI	2022
3	Surat Keputusan Direktur tentang Keringanan SPP Mahasiswa	PP Tarif PNB	Politeknik ATK Yogyakarta	- Sub Bagian Adm. Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama - Bagian Keuangan	2022
4	Surat Keputusan Direktur tentang SOP Evaluasi Kegiatan dan Program	Aturan tentang SAKIP	Politeknik ATK Yogyakarta	- Sub Bagian Adm. Umum & Keuangan - Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Perencanaan	2022
5	Surat Keputusan Direktur tentang Pemberian <i>Reward and Punishment</i>	- PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil - PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	Politeknik ATK Yogyakarta	- Sub Bagian Adm. Umum & Keuangan - Bagian Kepegawaian	2022
6	Surat Keputusan Direktur tentang Pengaturan Kelebihan Beban Mengajar Dosen	Permen SBM	Politeknik ATK Yogyakarta	- Program Studi - Sub Bagian Adm. Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama	2022
7	Surat Keputusan Direktur tentang Pelaksanaan Fasilitasi <i>Silver Expert</i>	Peraturan Menteri Perindustrian No. 40 Tahun 2017	Politeknik ATK Yogyakarta	- Sub Bagian Umum dan Keuangan - BPSPDMI	
8	Surat Keputusan Direktur tentang Panduan Pelaksanaan Kelas Industri	Keputusan Menteri Perindustrian No. 1009 Tahun 2021 tentang Pengembangan Vokasi Industri Bertaraf Global Menuju Corporate University BPSPDMI Kementerian Perindustrian	Politeknik ATK Yogyakarta	- Program Studi - Sub Bagian Adm. Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama -	2023

Daftar Pustaka